



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 41 TAHUN 2021

TENTANG

MASTERPLAN SMART CITY KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai dasar acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan *Smart City* di Kabupaten Rembang perlu menyusun *Masterplan Smart City*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Masterplan Smart City* Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Pelayanan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 124);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 151);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 156);
13. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017

Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *MASTERPLAN SMART CITY* KABUPATEN REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Bupati adalah Bupati Rembang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang.
6. *Masterplan Smart City* adalah dokumen perencanaan pengembangan Smart City Kabupaten Rembang.
7. *Smart City* adalah kota cerdas yang mengembangkan dan mengelola kota dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghubungkan, memonitor dan mengendalikan berbagai sumber daya yang ada di kota dengan lebih efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Pasal 2

Penyusunan Dokumen *Masterplan Smart City* Kabupaten Rembang bertujuan:

- a. sebagai dasar, acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan *Smart City* di Kabupaten Rembang;
- b. sebagai alat pengendali terhadap seluruh kegiatan untuk mendukung *Smart City* Kabupaten Rembang;
- c. dasar yang dijadikan pedoman pemilihan keputusan dan penetapan kebijakan dalam pembangunan *Smart City* Kabupaten Rembang;

- d. menyelaraskan penerapan *Smart City* dengan *business process* pemerintah daerah, Perangkat Daerah lainnya, Instansi terkait serta dapat berakselerasi dalam percepatan transformasi birokrasi;
- e. menjamin terakomodasinya sasaran pembangunan di dalam RPJMD Kabupaten Rembang dalam dokumen perencanaan Rembang *Smart City*;
- f. mendorong proses pengembangan *Smart City* yang efektif, efisien, inklusif, dan partisipatif; dan
- g. menjadi pedoman dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi *Smart City* Kabupaten Rembang.

BAB II

SISTEMATIKA MASTERPLAN

Pasal 3

- (1) *Masterplan* pengembangan *smart city* Kabupaten Rembang memuat arah kebijakan, strategi pengembangan, dan penyelarasan program perangkat daerah dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Sistematika dokumen *masterplan smart city* Kabupaten Rembang meliputi:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Visi Misi Rembang *Smart City*;
 - c. BAB III : Strategi Pembangunan Rembang *Smart City*;
 - d. BAB IV : Rencana Aksi Rembang *Smart City*;
 - e. BAB V : Peta jalan Pembangunan Rembang *Smart City*.

Pasal 4

Dokumen *masterplan smart city* Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 secara rinci tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan dan pengembangan *smart city* Kabupaten Rembang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan mulai tahun 2021 sampai dengan 2030 dan dapat disesuaikan dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan/atau hasil evaluasi.
- (2) Pelaksanaan dan pengembangan *smart city* menjadi tanggung jawab seluruh Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah dengan melibatkan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 30 November 2021.

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 30 November 2021.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,



FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021 NOMOR 42

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana diketahui bersama bahwa visi dan misi Bupati Rembang terpilih saat ini yang dijabarkan melalui strategi pembangunan dan program diantaranya adalah digitalisasi birokrasi dan Rembang *Smart City* yang rencananya akan diwujudkan melalui APIK-Desaku (Akses Pemanfaatan Internet & Komunikasi) yaitu pelayanan masyarakat berbasis IT sampai ke Desa, Ora Ribet Birokrasiku (Penyederhanaan Layanan) sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan publik, dan Gamblang Pemerintahku (Keterbukaan Informasi) yang mana memberikan kemudahan akses informasi serta pengaduan dari masyarakat kepada pemerintah berbasis digital.

Salah satu hal terpenting dalam penerapan *Smart City* di suatu daerah adalah adanya Master Plan, Arsitektur, dan *Blueprint Smart City*. Pembangunan Rembang *Smart City* merupakan usaha yang *continue*, bertahap, dan bersifat multi sektoral oleh karena itu diperlukan sebuah perencanaan berjangka waktu dan terintegrasi yang dituangkan dalam bentuk dokumen *Masterplan Smart City* dengan *road map* yang berisi program selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) karena terdapat *linkage* yang kuat antara RPJMD dengan 6 pilar *Smart City*.

Masterplan Smart City haruslah memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Sesuai dengan karakter dan kebutuhan spesifik daerah.
2. Berpeluang untuk berhasil dilaksanakan yang maksimal.
3. Obyektif, tepat sasaran, dan tepat guna.
4. Berkesinambungan dalam menjaga keseimbangan kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan.
5. Dapat secara nyata diimplementasikan sesuai dengan kemampuan daerah.

Filosofi dari Rembang *Smart City* juga merupakan salah satu

upaya Kabupaten Rembang pulih dan berupaya keluar dari pandemi COVID-19 yang masih menjadi masalah global saat ini. Pandemi COVID-19 telah merubah cara-cara baru dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara termasuk bagi Pemerintah Daerah dalam mengelola seluruh proses pelayanan masyarakat untuk memastikan seluruh kegiatan di berbagai bidang berjalan secara normal dengan penyesuaian terhadap kondisi pandemi COVID-19. Dalam tatanan kenormalan baru, kota dan kabupaten menerapkan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) yang saling terintegrasi dan berpedoman pada panduan *new normal* yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pandemi Covid-19 memberikan pembelajaran yang sangat baik untuk penerapan *Smart City*.

Tujuan membangun sebuah kota yang cerdas adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dengan menggunakan informasi perkotaan dan teknologi untuk meningkatkan efisiensi layanan dan memenuhi kebutuhan warga. Teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan pejabat kota untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat dan infrastruktur kota dan memantau apa yang terjadi di kota, bagaimana kota ini berkembang, dan cara mengaktifkan kualitas hidup yang lebih baik. Melalui penggunaan sensor terintegrasi dengan sistem pemantauan *real-time*, data yang dikumpulkan dari warga dan perangkat, kemudian diolah dan dianalisis. Informasi dan pengetahuan yang dikumpulkan adalah kunci untuk mengatasi in-efisiensi.

Pembangunan berbasis *Smart City* menyediakan ruang inovasi yang luas untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi dan meningkatkan kualitas hidup manusia dan komunitas setempat. Mengembangkan *smart city* bukan dengan menjadikan IT dan solusi teknologi sebagai tujuan akhir tetapi lebih fokus kepada inovasi dan terobosan untuk menyelesaikan masalah prioritas dan atau mengembangkan sektor unggulan daerah, berbasis data yang terintegrasi, dan kolaboratif antar sektor. Dan tentu saja, pembangunan berbasis *smart city* secara simultan harus bisa

menghasilkan *smart people* dan *smart society*.

Pembangunan *Smart City* juga tidak sekedar mengedepankan efisiensi birokrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) namun juga bagaimana membangun masyarakat dengan menjadikan infrastruktur dan sarana TIK sebagai faktor pendukung atau enabler. Dari sisi penguatan *smart governance*, implementasi *smart city* dengan adanya pelayanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (ICT) dan penguatan informasi publik. Sementara itu, dari sisi *smart ekonomi* dan *smart branding* ditunjukkan dengan adanya penguatan UMKM, inovasi produk, dan pemasaran dengan pemanfaatan ICT dan perubahan gaya masyarakat dalam mengakses layanan ekonomi secara *online*. Sementara dalam penguatan *smart society* dikaitkan dengan kearifan lokal yaitu budaya gotong royong, “tepo seliro”, “guyup rukun” dan masyarakat cerdas yang tercermin dalam kemampuan menghadapi berbagai permasalahan yang terjadi. Sedangkan untuk *smart environment* dan *smart living* berupa budaya hidup sehat dan kesadaran akan kelestarian lingkungan.

Penyusunan *Masterplan Rembang Smart City* ini menggunakan paradigma berbasis enam pilar, meliputi: *Smart Governance*, *Smart Branding*, *Smart Economy*, *Smart Living*, *Smart People*, dan *Smart Environment*. Keenam pilar tersebut saling terkait dan menyentuh seluruh dinamika yang terjadi di Kabupaten Rembang dan penghuninya. Dengan begitu, *Masterplan Rembang Smart City* diharapkan bisa menyentuh semua sisi kehidupan masyarakat yang tinggal di Kabupaten Rembang.

1. **Smart Governance:** Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan proses perencanaan dan pengambilan keputusan, sekaligus mentransformasi sistem pelayanan publik;
2. **Smart Branding:** Peningkatan citra kota/kabupaten berbasis inovasi dan teknologi, dengan menonjolkan pembenahan di sisi wajah kota, potensi wisata dan kuliner, serta kekayaan budaya;
3. **Smart Economy:** Bagaimana teknologi dimanfaatkan untuk mengakselerasi potensi ekonomi daerah, termasuk meningkatkan kemudahan melakukan usaha atau membuka

pasar lebih luas bagi industri kecil;

4. **Smart Living:** Strategi berbasis Inovasi dan teknologi yang bertujuan meningkatkan kenyamanan dan kualitas hidup masyarakat;
5. **Smart Society:** Bagaimana pemerintah kota/kabupaten meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerahnya, utamanya menyambut era digitalisasi;
6. **Smart Environment:** Strategi menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat demi peningkatan kualitas hidup masyarakat dan daya tahan sebuah kota/kabupaten.

Masterplan ini berperan besar dalam membantu pemerintah menetapkan kebijakan, regulasi, dan arah serta prioritas pembangunan kabupaten. Sebagai perencanaan yang disusun secara khusus berdasarkan visi, identitas dan karakter daerah, *Masterplan Smart City* mempermudah pemerintah dalam mengurai masalah daerah. *Masterplan Smart City* juga memastikan proses tranformasi menuju konsep kabupaten cerdas baik itu pada tahap perencanaan, implementasi, maupun monitoring dan evaluasi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan hasil yang diharapkan. *Masterplan* ini diharapkan akan menjadi panduan pemerintah Kabupaten Rembang dalam melakukan implementasi pembangunan berbasis *smart city* dalam jangka waktu 5 (lima) hingga 10 (sepuluh) tahun ke depan yang akan direview setelah 5 (lima) tahun pertama dilaksanakan atau secara periodik sesuai kebutuhan.

1.2. Tujuan

Masterplan Smart City Kota Rembang ini disusun sebagai panduan dan alat bantu bagi pemerintah daerah, tim penggerak dan pendamping, serta entitas lain yang terlibat dalam proses perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi pengembangan di Kota Rembang berdasarkan konsep *Smart City*. Adapun tujuan dari disusunnya konsep pengembangan *Smart City* Kota Rembang adalah sebagai

berikut:

1. sebagai pedoman, acuan dan *roadmap* dalam penyusunan rencana pembangunan, implementasi dan pengembangan *Smart City* di Kabupaten Rembang sebagai bagian dari penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang;
2. menjamin terakomodasinya penyelenggaraan *smart city* yang terintegrasi dengan dokumen daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra dan Renja Perangkat Daerah;
3. sebagai alat pengendali terhadap seluruh kegiatan untuk mendukung *Smart City* Kabupaten Rembang;
4. menyelaraskan penerapan *Smart City* dengan business process pemerintah daerah, OPD lainnya, Instansi terkait serta dapat berakselerasi dalam percepatan transformasi birokrasi;
5. mendorong proses pengembangan Rembang *Smart City* yang efektif, efisien, inklusif, dan partisipatif.

1.3. Landasan Hukum

Dalam penyusunan konsep *Smart City* Kota Rembang ini, aturan-aturan yang dipakai merujuk kepada berbagai ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

7. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 09 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/M/KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi.

1.4. Kerangka Pikir Rembang *Smart City*

Istilah "*Smart City*" atau dalam Bahasa Indonesia "Kota Cerdas", didasarkan pada kata yaitu "*Smart*" dan "*City*". Kata "*Smart*" atau "Cerdas" dapat dimaknai sebagai kemampuan untuk menangkap, merasakan, dan memproses pesan atau data masukan, dan meresponnya secara cepat dan tepat. Sementara kata "*City*" atau "Kota" menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 Pasal 1 merupakan pusat permukiman dan kegiatan penduduk yang memiliki batasan administrasi yang telah diatur dalam perundang-undangan serta permukiman yang telah memperlihatkan watak serta ciri kehidupan perkotaan. Dari makna kata-kata penyusunnya, *Smart City* atau Kota Cerdas dapat

didefinisikan sebagai sebuah kota yang memiliki kemampuan proaktif mengidentifikasi dan mengumpulkan data-data dari berbagai komponen kota (baik komponen fisik maupun sosial) untuk selanjutnya memproses dan meresponnya secara cepat dan tepat.

Smart City pada hakekatnya merupakan *Cyber-Physical- Social systems* dalam lingkup kota, yakni sebagai sistem yang mengintegrasikan sistem fisik kota, sistem sosial, dan sistem digital melalui media siber (Internet). Sistem fisik kota mencakup sarana-prasarana pendukung kehidupan kota, seperti: gedung, jembatan, jaringan listrik, sungai, jalan, kantor, stasiun, terminal, bandara, infrastruktur komunikasi, dan lain-lain. Sementara sistem sosial kota mencakup berbagai lingkungan manusia dan individu yang ada di dalam kota yang meliputi pemerintah kota, komunitas, keluarga, pasar, masyarakat umum, maupun individu warga kota. Sedangkan sistem digital kota mencakup sensor, jaringan komputer, komputasi, dan kontrol, pusat data, dan lain-lain.

Smart city yang berarti kota pintar, merupakan suatu konsep pengembangan, penerapan, dan implementasi teknologi yang diterapkan di suatu daerah sebagai sebuah interaksi yang kompleks di antara berbagai sistem yang ada di dalamnya. Tujuan dari pendekatan *smart city* adalah mencapai informasi dan pengelolaan kota yang terintegrasi. Integrasi ini dapat melalui manajemen jaringan digital geografi perkotaan, sumber daya, lingkungan, ekonomi, sosial dan lainnya. Struktur dari *smart city* meliputi lapisan persepsi, lapisan jaringan dan lapisan aplikasi, yang dapat membuat masa depan dunia semakin cukup dan terukur, semakin interkoneksi dan interoperabilitas dan semakin cerdas.

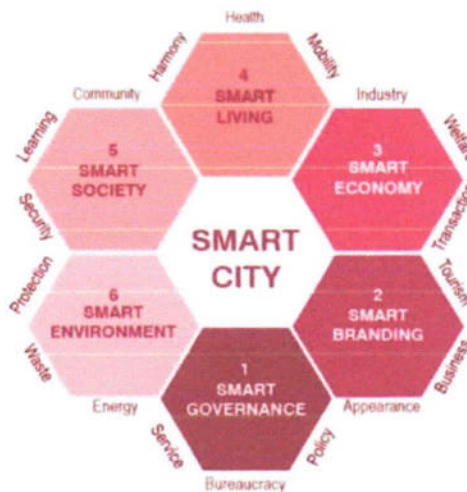
Smart City juga merupakan sebuah kategorisasi kota sekaligus konsep pengembangan dan pengelolaan kota dengan memberdayakan (memanfaatkan secara optimal) teknologi terkini secara intensif (termasuk jaringan komputer, sensor, *internet of things*, *cloud computing*, *big data*, *data analytic*, *space/geographical information integration*, dan lain-lain) guna mengintegrasikan sistem

manusia dengan sistem fisik kota dan sistem digital sehingga mampu secara kreatif dan inovatif, yaitu:

1. Merasakan, mendengar, menangkap, memahami dan merespon kebutuhan warganya secara proaktif, cepat, dan tepat;
2. Memonitor, mengontrol, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan meningkatkan kualitas layanan publik dan layanan kota lainnya seperti transportasi, listrik, lingkungan hidup, keamanan, dan layanan kondisi darurat;
3. Memonitor kondisi-kondisi infrastruktur penting kota,
4. Merencanakan aktivitas-aktivitas perawatan, dan meningkatkan keamanannya;
5. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kota secara efisien dan berkelanjutan;
6. Meningkatkan efisiensi operasional dan layanan kota;
7. Meningkatkan kenyamanan untuk tinggal (*livable*);
8. Meningkatkan kualitas hidup/kesejahteraan warganya (*quality of life*);
9. Menjaga kesetaraan bagi semua warga masyarakat (*equity*);
10. Memastikan perkembangan dan keberlangsungan kota di masa mendatang dan memenuhi kebutuhan generasi saat ini maupun mendatang (*sustainable*) baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan;
11. Meningkatkan kemampuan bersaing kota (*competitiveness*);
12. Meningkatkan ketangguhan kota dalam mengantisipasi dan segera pulih dari akibat bencana, kriminalitas, dan berbagai potensi resiko lainnya (*resilience*).

1.5. Kerangka Pikir Dimensi *Smart City*

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (2017) dalam rangka Gerakan Mewujudkan 100 *Smart City* (kabupaten/kota) merekomendasikan model *Smart City* untuk kota/kabupaten di Indonesia yang mencakup 6 dimensi, yakni: *Smart Governance*, *Smart Branding*, *Smart Economy*, *Smart Living*, *Smart Society*, dan *Smart Environment* (Gambar I.1).

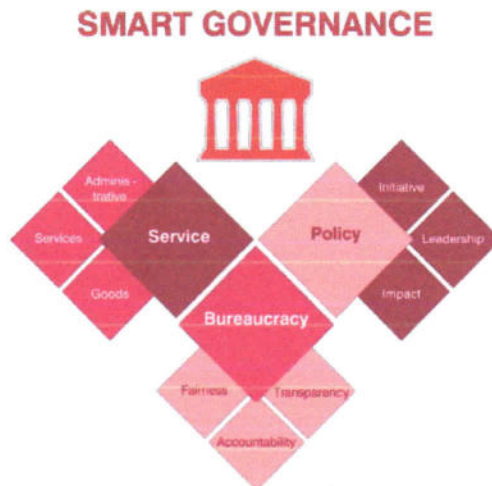


Gambar I.1 Dimensi Smart City

Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN).

1. Kerangka Pikir Dimensi Smart Governance

Smart Governance atau tata kelola pemerintahan kota yang pintar adalah konsep sekaligus praktik mengelola manajemen dan tata pamong/kelola pemerintahan dan layanan publik secara lebih cepat, efisien, efektif, responsif, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu.



Gambar I.2 Smart Governance

Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN)

Salah satu ciri *Smart Governance* adalah pola, budaya, dan proses bisnis birokrasi internal pemerintah dan layanan publik yang menjadi lebih ringkas, cepat, mudah, responsif dan

komunikatif, serta efisien waktu, biaya, dan usaha. *Smart Governance* direkomendasikan menjadi basis bagi keberhasilan pembangunan dimensi-dimensi *Smart City* lainnya. Konsep *Smart Governance* harus diterapkan sekaligus diukur dalam 3 sub-dimensi, yakni: Layanan publik (*Service*), Birokrasi (*Bureaucracy*), dan Kebijakan publik (*Policy*).

a. Layanan Publik (*Public Service*)

Dengan memanfaatkan teknologi terkini, dengan cara inovatif dan kreatif, pemerintah daerah mampu menyediakan:

- 1) Pelayanan administrasi kepada masyarakat (seperti: KTP, SIUP, ijin usaha, akta kelahiran, sertifikat tanah, NPWP, IMB, dan lain-lain) secara lebih baik (lebih cepat, ekonomis, praktis dalam waktu dan usaha, dan transparan).
- 2) Peningkatan penyediaan sarana prasarana dan monitoring penyediaan (sembako, air bersih, dan lain-lain).
- 3) Peningkatan penyediaan sarana prasarana dan monitoring penyediaan kebutuhan jasa pokok untuk masyarakat masyarakat (listrik, telepon, internet dan lain-lain).

b. Birokrasi (*Bureaucracy*)

Dengan memanfaatkan teknologi terkini, dengan cara inovatif dan kreatif, pemerintah daerah mampu membangun Birokrasi yang efisien, efektif, adil, transparan, *accountable*, dan bebas korupsi. Misalnya: *sistem e-planning, e-budgeting, e-monev* dan lain-lain. Pengembangan aplikasi *e-gov* harus diarahkan menuju *integrated & inter-operability e-gov* atau yang saling berkomunikasi dan terhubung antar satu aplikasi dengan aplikasi lainnya serta lintas OPD atau yang disebut dengan *Smart e-Gov*. Pelayanan *Smart e-Gov* ini perlu didukung dengan sebuah "*City Operation Center (COC)*".

c. Kebijakan Publik (*Public Policy*)

- 1) Dengan memanfaatkan teknologi terkini, dengan cara inovatif dan kreatif, pemerintah daerah mampu membangun budaya dan praktik *citizen-centered policy* yakni setiap kebijakan diambil dengan secara aktif berkomunikasi dan mengakomodasi pendapat/masukan

dari masyarakat, berorientasi pada pemenuhan kepentingan masyarakat, dan memberi akses luas terhadap dokumen-dokumen kebijakan publik pemerintah.

- 2) Sistem informasi kebijakan pemerintah (Perda dan Peraturan Kepala Daerah) yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah.

2. Kerangka Pikir Dimensi *Smart Branding*

Smart Branding atau *branding* daerah yang pintar adalah praktik inovatif dan kreatif pemerintah daerah memanfaatkan teknologi terkini untuk membangun *positioning* dan nilai jual (*brand value*) daerah baik di tingkat nasional maupun internasional.



Gambar 1.3 *Smart Branding*

Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN)

Branding ini akan mampu meningkatkan daya saing daerah dalam menarik partisipasi masyarakat dan investasi bisnis/investor dari dalam maupun luar daerah guna mendorong aktivitas perekonomian dan pengembangan kehidupan sosial dan budaya lokal yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Konsep *Smart Branding* harus diterapkan sekaligus diukur dalam 3 sub-dimensi, yakni: Pariwisata daerah (*Tourism*), Bisnis daerah (*Business Branding*), dan Wajah kota (*City Appearance*).

a. Pariwisata daerah (*Tourism*)

Dengan memanfaatkan teknologi terkini, dengan cara inovatif dan kreatif, pemerintah daerah mampu:

- 1) Menemukan, membangun, dan mengembangkan destinasi wisata daerah yang menarik dan layak bagi wisatawan (*destination*).
- 2) Membangun infrastruktur yang mendukung kenyamanan wisatawan (*amenities*).
- 3) Membangun budaya yang ramah kepada pengunjung (*hospitality*).

b. Bisnis daerah (*Business branding*)

Dengan memanfaatkan teknologi terkini, dengan cara inovatif dan kreatif, pemerintah daerah mampu:

- 1) Membangun platform dan memasarkan ekosistem perdagangan yang kondusif dan nyaman.
- 2) Membangun dan memasarkan ekosistem investasi yang mudah dan efektif.
- 3) Membangun dan memasarkan produk dan jasa industri kreatif khas daerah

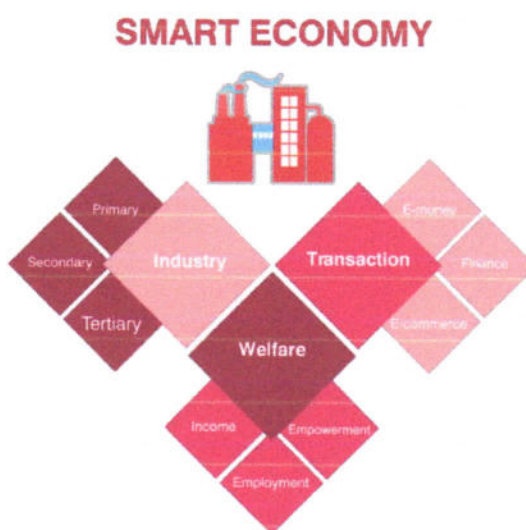
c. Wajah kota (*City Appearance*)

Dengan memanfaatkan teknologi terkini, dengan cara inovatif dan kreatif, pemerintah daerah mampu:

- 1) Mewujudkan penataan kembali wajah kota yang menonjolkan nilai arsitektur yang mencerminkan nilai-nilai khas daerah dan mengikuti dinamika modernisasi yang menginginkan sebuah tata ruang dan tata wilayah kota yang indah, bersih, rapi, dan membanggakan dengan kualitas arsitektur berkelas internasional.
- 2) Membangun batas wilayah (*edge*), membangun penanda sebuah lokasi yang penting, berkesan bagi pengunjung (*landmark*), menyediakan navigasi yang unik menuju kota (*signage*), struktur jalan yang teratur (*path*), dan titik simpul kota (*node*) seperti alun-alun, simpang dan lain-lain.

3. Kerangka Pikir Dimensi *Smart Economy*

Smart Economy atau tata kelola perekonomian yang pintar merupakan kemampuan mewujudkan ekosistem perekonomian daerah yang mendukung sektor ekonomi unggulan daerah dan memenuhi tuntutan era informasi, yakni adaptif terhadap perubahan cepat (*agile*), *global scope*, kolaborasi/*sharing economy*, terintegrasi, inovasi, dan *personal customization*.



Gambar I.4 *Smart Economy*

Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN)

Konsep *Smart Economy* diterapkan sekaligus diukur dalam 3 sub-dimensi, yakni: ekosistem Industri (*industry*), peningkatan Kesejahteraan masyarakat (*welfare*), dan ekosistem transaksi Keuangan (*transaction*).

a. Ekosistem Industri (*Industry*)

Dengan memanfaatkan teknologi terkini, cara inovatif dan kreatif, pemerintah daerah mampu membangun daya saing industri daerah pada *leading sector* industri tertentu dengan membangun dan mengintegrasikan industri primer (misalnya pertanian, perikanan, peternakan dan lain-lain), industri sekunder (misalnya manufaktur, pengolahan, *packaging* dan lain-lain), dan industri tersier (misalnya pasar produk daerah).

b. Kesejahteraan rakyat (*Welfare*)

Dengan memanfaatkan teknologi terkini, dengan cara inovatif dan kreatif, pemerintah daerah mampu:

- 1) Mengembangkan program peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan rumah tangga (*income*)
- 2) Program peningkatan penyerapan angkatan kerja (*employment*)
- 3) Program pemberdayaan ekonomi masyarakat (*empowerment*)

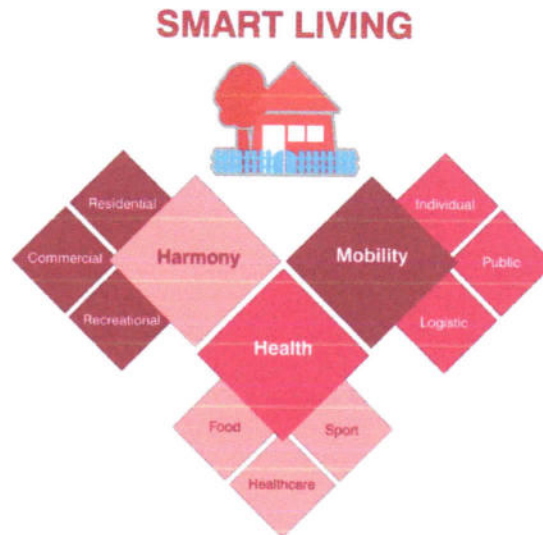
c. Transaksi keuangan (*Transaction*)

Dengan memanfaatkan teknologi terkini, dengan cara inovatif dan kreatif, pemerintah daerah mampu:

- 1) Membangun ekosistem transaksi keuangan digital untuk menjamin kelancaran pembayaran menuju masyarakat yang *less cash*.
- 2) Mewujudkan masyarakat yang *bankable* dan memiliki akses terhadap permodalan.
- 3) Mewujudkan ekosistem ekonomi digital dengan mendorong industri *e-commerce* dan *market place*.

4. Kerangka Pikir Dimensi *Smart Living*

Smart Living merupakan kemampuan menciptakan lingkungan tempat tinggal yang layak, nyaman, dan efisien.



Gambar I.5 *Smart Living*

Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN)

Konsep *Smart Living* diterapkan dan diukur dalam 3 sub-dimensi, yakni: harmonisasi tata ruang wilayah (*harmony*), sarana prasarana Kesehatan (*health*), dan sarana prasarana transportasi manusia dan barang (*mobility*).

a. Harmonisasi tata ruang wilayah (*Harmony*)

Pemerintah daerah mampu mewujudkan tata ruang wilayah yang nyaman dan harmonis antara lingkungan pemukiman (*residential*), lingkungan pusat kegiatan bisnis (*commercial*) yang didukung dengan fasilitas rekreasi untuk keluarga (*recreational*)

b. Sarana prasarana Kesehatan (*Health*)

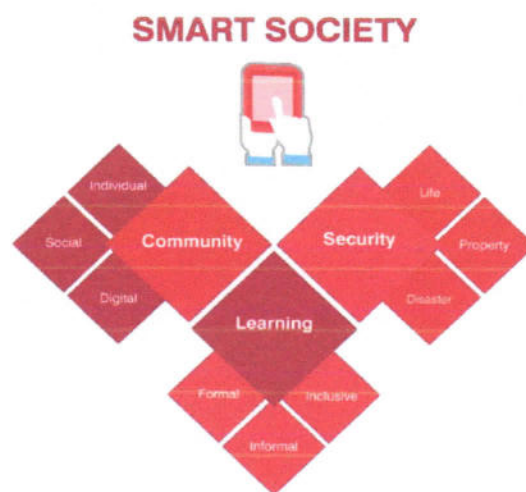
Pemerintah daerah mampu menyediakan akses terhadap ketersediaan makanan dan minuman sehat (*food*), pelayanan kesehatan yang (*healthcare*), dan sarana dan prasarana olahraga (*sport*).

c. Sarana prasarana Transportasi (*Mobility*)

Pemerintah daerah mampu membangun ekosistem transportasi yang menjamin kemudahan mobilitas manusia maupun barang (logistik) daerah.

5. Kerangka Pikir Dimensi *Smart Society*

Smart Society atau masyarakat yang cerdas yakni kemampuan pemerintah daerah dalam mewujudkan ekosistem sosio-teknis (sosial-virtual) masyarakat yang humanis, produktif, dinamis, komunikatif, dan interaktif dengan *digital literacy* tinggi.



Gambar I.6 *Smart Society*

Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN)

Konsep *Smart Society* diterapkan dan diukur dalam 3 sub-dimensi, yakni: Interaksi masyarakat (*Community*), Ekosistem Belajar (*Learning*), dan Keamanan masyarakat (*Security*).

a. Interaksi masyarakat (*Community*)

- 1) Interaksi sosial masyarakat terjadi secara paralel antara individu dengan individu yang lain, individu dengan kelompok sosial, dan antar kelompok sosial, baik secara fisik maupun virtual (digital) dengan sasaran mewujudkan partisipasi publik dalam pembangunan daerah. Contoh: berbagai program untuk mendukung berbagai kemajuan *Smart City* misalnya program-program kepemudaan, peningkatan keahlian UKM dan lain-lain.
- 2) Pengembangan komunitas warga melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia baik secara individu, sosial mampu memanfaatkan lingkungan digital dengan positif dan produktif.

b. Ekosistem Belajar (*Learning*)

- 1) Mewujudkan ekosistem pendidikan yang saling mendukung antara pendidikan formal dan non-formal untuk memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap pendidikan termasuk bagi masyarakat yang *disable*.
- 2) Membangun platform edukasi bagi masyarakat misalnya *smart school*, *smart campus*, *smart pesantren*, *smart training program* dan lain-lain.

c. Keamanan masyarakat (*Security*)

Mewujudkan suatu sistem atau manajemen keamanan dan keselamatan bagi warga masyarakat baik perlindungan keselamatan jiwa, keselamatan properti atau harta benda, dan keselamatan atas risiko bencana bagi masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya dan alat kelengkapan pemerintah maupun teknologi.

6. Kerangka Pikir Dimensi *Smart Environment*

Smart Environment atau pengelolaan lingkungan yang pintar merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, bertanggungjawab, dan berkelanjutan.



Gambar I.7 *Smart Environment*

Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN)

Konsep *Smart Environment* diterapkan sekaligus diukur dalam 3 sub-dimensi, yakni: Proteksi lingkungan (*Protection*), pengelolaan Sampah dan Limbah (*Waste*), dan pengelolaan Energi (*Energy*).

a. Proteksi Lingkungan (*Protection*)

- 1) Mengembangkan system tata Kelola perlindungan sumber daya air tanah, dan udara serta mengintegrasikannya denga teknologi monitoring pencemaran tanah, air, dan udara, misalnya dengan memanfaatkan teknologi sensor pada *Internet of Thing* (IoT).
- 2) Membangun ruang terbuka hijau
- 3) Melakukan restorasi sungai yang memiliki tingkat pencemaran tinggi
- 4) Mengendalikan polusi udara

b. Pengelolaan Sampah dan Limbah (*Waste*)

- 1) Mengembangkan sistem tata kelola limbah atau sampah rumah tangga (*household*) dan industrial

- 2) Mengembangkan sistem tata kelola limbah dan sampah publik (*public*)
 - 3) Menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan agar tidak mengganggu pemandangan, tidak merusak indra penciuman, dan menghindari banjir akibat genangan sampah yang menyumbat saluran-saluran air pembuangan limbah atau sirkulasi air residensial serta ketersediaan sistem sanitasi rumah tangga, industri dan publik yang baik dan bertanggung-jawab.
- c. Pengelolaan Energi (*Energi*)
- 1) Pemanfaatan energi yang efisien dan bertanggungjawab
 - 2) Pengembangan energi alternatif yang ramah lingkungan (*environmentally friendly*) dan berkelanjutan (*sustainable*) serta terjangkau bagi masyarakat. Misalnya pemanfaatan limbah/sampah sebagai biogas, energi surya, tenaga angin, biomassa (tumbuhan dan hewan) dan lain-lain.

BAB II
VISI MISI REMBANG SMART CITY

2.1. Visi Rembang Smart City

Dalam mengembangkan visi dan misi *Smart City* harus memperhatikan beberapa hal yaitu:

1. Visi dan misi pembangunan daerah yang tercantum di dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, yaitu RPJP dan RPJMD
2. Visi dan Misi pembangunan Nasional
3. Harapan warga masyarakat
4. Hasil analisa kondisi kesiapan daerah dan kondisi masa depan

Sedangkan untuk penyusunan visi *Smart City* terdapat kriteria dalam perumusannya, yaitu sebagai berikut:

1. Menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang;
2. Menjawab permasalahan pembangunan *Smart City* Kabupaten Rembang dan/atau isu strategis yang perlu diselesaikan dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
3. Disertai dengan penjelasan yang lebih operasional sehingga mudah dijadikan acuan bagi perumusan kebijakan, strategi dan program;
4. Disertai penjelasan mengapa visi *smart city* tersebut dibutuhkan di Kabupaten Rembang, relevansi visi dengan permasalahan dan potensi pembangunan di Kabupaten Rembang;
5. Sejalan dengan visi dan arah pembangunan Kabupaten Rembang dan nasional.

Dalam kaitan ini, visi Kabupaten adalah: “**Mewujudkan Rembang Gemilang 2026**”. Dari visi tersebut, misi yang bisa diwujudkan adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan profesionalisme, modernisasi organisasi, dan tata kerja birokrasi;
2. Mengembangkan sumber daya Manusia yang semakin berkualitas dan terproteksi jaminan sosial;

3. Membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
4. Membangun kemandirian desa berbasis potensi lokal.

Dengan mempertimbangkan kesiapan daerah, kondisi masa depan yang akan dicapai Kabupaten Rembang dalam implementasi *Smart City/Smart Regency* serta arahan strategis dari visi RPJMD Kabupaten Rembang 2021-2026 maka dirumuskan Visi *Smart City* Kabupaten Rembang tahun 2021-2030:

“Rembang Religius, Cerdas, Inovatif, Kompetitif dan Berbudaya”

Adapun penjabaran dari Visi tersebut diatas adalah sebagai berikut :

RELIGIUS

Kondisi masyarakat Kabupaten Rembang sebagai kota santri yang memiliki nilai-nilai, norma, semangat dan kaidah agama, yang harus menjiwai, mewarnai dan menjadi ruh atau pedoman bagi seluruh aktivitas kehidupan, termasuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Peningkatan Kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai agama dan menjaga kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara.

CERDAS

Mengintegrasikan teknologi informasi/*smart computing* untuk menjalankan roda pemerintahan dan kehidupan masyarakat yang instrumennya saling berhubungan dan efisien. Mampu menggunakan SDM, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi, dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat.

INOVATIF

Mewujudkan masyarakat dan pemerintah yang mendayagunakan pemikiran dan berbagai ilmu pengetahuan termasuk teknologi untuk selalu menghasilkan ide dan produk

baru dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan cerdas, sehingga tercipta peningkatan kualitas hidup masyarakat Rembang.

KOMPETITIF

Membentuk masyarakat Rembang menjadi masyarakat yang cerdas dan berdaya saing serta memiliki ekosistem perkotaan yang maju dengan berbasis pada kearifan lokal, berpendidikan tinggi, terbuka, kreatif dan mampu memanfaatkan perkembangan teknologi informasi.

BERBUDAYA

Mewujudkan masyarakat Rembang yang mampu melakukan aktivitas budaya yang mengekspresikan sistem kepercayaan (religi), kesenian, mata pencaharian, teknologi, sistem sosial dan sistem lingkungan, tata ruang dan arsitektur dengan mengaktualisasikan kekayaan potensinya dan mengkonservasinya dengan saksama atas kekayaan budaya yang dimilikinya, terutama yang tampak pada adat dan tradisi, seni pertunjukan, kerajinan dan tata ruang dan arsitektur.

2.2. Sasaran Rembang Smart City

Dari kerangka pikir *smart city* sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya, kemudian dirumuskan tujuan dan sasaran-sasaran pembangunan Rembang *smart city/regency* sebagai upaya untuk mewujudkan Kabupaten Rembang yang “Religius, Cerdas, Inovatif, Kompetitif dan Berbudaya” yang selanjutnya dilakukan sinkronisasi visi misi *Smart City* Kabupaten Rembang yang terbagi dalam enam dimensi *smart city* yaitu; *smart governance*, *smart branding*, *smart economy*, *smart living*, *smart society* dan *smart environment* dengan visi dan misi Kabupaten Rembang dalam RPJMD. Hasil sinkronisasi dapat dilihat pada Tabel II.1

Tabel II.1
Sasaran Smart City Kabupaten Rembang

Smart City			RPJMD		
Dimensi	Misi	Sasaran		Misi	Sasaran
Smart Governance	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang cerdas, partisipatif, dan akuntabel dengan mengutamakan pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi.	a) Pelayanan Publik: 1) Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi. 2) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perijinan serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi. 3) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. 4) Meningkatkan kualitas sarpras layanan teknologi informasi kesehatan masyarakat. 5) Meningkatkan kualitas layanan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi. 6) Meningkatkan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik. 7) Meningkatkan/mengembangkan aplikasi data base ketenagakerjaan. 8) Meningkatkan kualitas pengelolaan data dan sistem	Misi ke 1	Mengembangkan profesionalisasi, modernisasi organisasi dan tata kerja birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik

		<p>informasi penanaman modal.</p> <p>9) Meningkatkan kualitas pengelolaan Informasi Kependudukan.</p>			
		<p>b) Manajemen Birokrasi yang Efisien</p> <p>1) Mengembangkan teknologi informasi untuk tata kelola birokrasi yang transparan dan bertanggungjawab.</p> <p>2) Mengembangkan aplikasi yang terintegrasi untuk semua OPD.</p> <p>3) Meningkatkan kualitas sistem keamanan aplikasi Pemerintah Kabupaten.</p> <p>4) Mengupgrade sistem dan perangkat TIK.</p> <p>5) Meningkatkan keamanan informasi.</p> <p>6) Mengelola media informasi dan komunikasi publik.</p> <p>7) Pendampingan OPD dan Desa dalam sistem pengawasan daerah.</p> <p>8) Meningkatkan kapasitas pengelola pasar sesuai peraturan perundangan.</p> <p>9) Meningkatkan kualitas usaha industri perempuan (IR).</p> <p>10) Meningkatkan Aksesibilitas</p>	Misi ke 1	Mengembangkan profesionalisasi, modernisasi organisasi dan tata kerja Birokrasi	Meningkatnya kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan

		Data dan Informasi Kepegawaian.			
		<p>c) Efisiensi Kebijakan Publik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengembangkan sistem informasi kebijakan Publik yang interaktif, informatif, komunikatif dan partisipatif berbasis IT. 2) Menyusun kebijakan publik yang informatif, komunikatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 3) Sosialisasi kebijakan dan data statistik berbasis IT. 4) Meningkatkan daya saing sektor pertanian. 5) Kebijakan pembangunan <i>Smart city</i>. 	Misi ke 1	Mengembangkan profesionalisasi, modernisasi organisasi dan tata kerja birokrasi	Meningkatnya kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan
<i>Smart Branding</i>	Penataan kawasan <i>tourism center, cultural center, business center</i> dengan menguatkan identitas Rembang sebagai kabupaten seni dan budaya yang mendukung perkembangan sektor pariwisata.	<p>a) Membangun dan Memasarkan Ekosistem Pariwisata (Tourism Branding)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengembangkan sistem informasi pariwisata. 2) Mengembangkan seni tradisi. 3) Meningkatkan pelestarian cagar budaya. 4) Menata Bangunan dan Lingkungannya. 5) Mengembangkan keunikan dan kekhasan potensi pariwisata. 	Misi Ke 3	Membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan dan peran investasi terhadap ekonomi daerah

		6) Mengembangkan kreatifitas dan inovasi event-event pariwisata.			
		<p>b) Membangun platform dan Memasarkan Ekosistem Bisnis Daerah (Business Branding)</p> <p>1) Mengembangkan usaha mikro.</p> <p>2) Meningkatkan kuantitas produk dalam negeri untuk masuk pasar rakyat dan retail modern.</p> <p>3) Meningkatkan/Mengembangkan pasar sesuai peraturan perundangan.</p> <p>4) Meningkatkan promosi investasi sektor ekonomi strategis melalui teknologi informasi.</p> <p>5) Meningkatkan kualitas hubungan industrial dalam mendukung <i>smart city</i>.</p> <p>6) Meningkatkan kualitas pemberdayaan dan pengembangan UKM agar dapat berdaya saing berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.</p>	Misi Ke 3	Membangun infrastruktur & ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas & berkeadilan	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan dan peran investasi terhadap ekonomi daerah

		<p>c) Membangun dan Memasarkan Wajah Kota (City Appearance Branding)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan kualitas Infrastruktur & Pembuatan RTH. 2) Menata fasilitas Bangunan dan Lingkungan (koridor, nodes dan landmark). 3) Meningkatkan kualitas ketentraman dan ketertiban berbasis IT. 4) Meningkatkan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum. 	Misi Ke 3	Membangun infrastruktur & ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas & berkeadilan	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan dan peran investasi terhadap ekonomi daerah
<i>Smart Economy</i>	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi, menuju kesejahteraan masyarakat dengan mengembangkan sektor industri kreatif, pertanian, perikanan dan UKM dengan menggunakan	<p>a) Membangun ekosistem industri yang berdaya saing (Industry)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengembangkan industri pengolahan perikanan berbasis IPTEK. 2) Mengembangkan ekonomi kreatif dan usaha koperasi berbasis IPTEK. 3) Meningkatkan pemberdayaan koperasi. 4) Membangun dan mengembangkan usaha industri untuk meningkatkan standar mutu dan daya saing produk. 5) Meningkatkan kordinasi perangkat daerah untuk 	Misi Ke 3	Membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan dan peran investasi terhadap ekonomi daerah

	SDM, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat	<p>mempercepat proses perijinan berbasis teknologi informasi.</p> <p>6) Menyusun kebijakan kemudahan investasi.</p> <p>7) Meningkatkan koordinasi Perangkat Daerah untuk mengembangkan sektor ekonomi.</p> <p>8) Menyediakan dan mengembangkan prasarana dan sarana pertanian.</p> <p>9) Meningkatkan kualitas pengelolaan perikanan tangkap dengan mengembangkan sistem informasi pelelangan.</p> <p>10) Mengembangkan sistem pemasaran hasil pengolahan ikan UMKM berbasis <i>online</i>.</p>			
		<p>b) Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat (<i>Welfare</i>)</p> <p>1) Meningkatkan ketersediaan kebutuhan bahan pokok.</p> <p>2) Membangun dan mengembangkan sektor industri.</p> <p>3) Menberdayakan dan mengembangkan usaha mikro.</p> <p>4) Mengembangkan industri perempuan.</p> <p>5) Mengembangkan sistem Informasi data potensi sumber</p>	Misi Ke 3	Membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Meningkatnya kualitas dan taraf hidup penduduk miskin

		<p>kesejahteraan sosial daerah di Kabupaten.</p> <p>6) Meningkatkan kualitas pelatihan kerja.</p>			
		<p>c) Membangun Ekosistem Transaksi Keuangan (Transaction)</p> <p>1) Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan perkoperasian.</p> <p>2) Mengembangkan UMKM dengan memanfaatkan teknologi informasi.</p> <p>3) Meningkatkan kapasitas usaha koperasi melalui pemberdayaan dan perlindungan.</p>	Misi Ke 3	Membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan dan peran investasi terhadap ekonomi daerah
<i>Smart Living</i>	Mewujudkan harmonisasi tata kota yang nyaman dengan sarana dan prasarana publik yang berkualitas dan terintegrasi dengan masyarakat yang sehat serta memiliki semangat kebersamaan yang kuat	<p>a) Harmonisasi Tata Ruang Wilayah (Harmony)</p> <p>1) Menata bangunan dan lingkungan sesuai dengan pemanfaatannya.</p> <p>2) Meningkatkan kualitas penanganan kawasan permukiman kumuh.</p> <p>3) Merehabilitasi rumah korban bencana/merelokasi.</p> <p>4) Meningkatkan prasarana dan sarana umum (PSU).</p> <p>5) Meningkatkan dan mengembangkan bangunan</p>	Misi Ke 3	Membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur

		<p>dan lingkungan pedestrian serta kawasan perkantoran.</p> <p>6) Meningkatkan kualitas penanggulangan bencana di kawasan rawan bencana.</p>			
		<p>b) Mewujudkan Prasarana Kesehatan (Health)</p> <p>1) Meningkatkan kualitas sarana prasarana kesehatan.</p> <p>2) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan budaya hidup sehat.</p> <p>3) Menyediakan fasilitas telekonsultasi pada Puskesmas.</p> <p>4) Integrasi sistem informasi Kependudukan dan KB.</p> <p>5) Meningkatkan kualitas layanan JKN.</p> <p>6) Meningkatkan dan mengembangkan kualitas Sarana dan Prasarana teknologi informasi Rumah Sakit.</p> <p>7) Meningkatkan ketersediaan obat, alat kesehatan dan makanan minuman.</p>	Misi ke 2	Mengembangkan sumber daya manusia yang semakin berkualitas dan terproteksi dalam jaminan sosial	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
		<p>c) Menjamin Ketersediaan Sarana Transportasi (Mobility)</p> <p>1) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.</p>	Misi Ke 3	Membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi	Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur

		<p>2) Meningkatkan kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota.</p> <p>3) Memenuhi kebutuhan perlengkapan jalan dan penyediaan angkutan umum.</p>		<p>untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan</p>	
Smart Society	Mewujudkan interaksi sosial masyarakat yang religius, terbuka, cerdas, berdaya saing dan mampu menjaga keamanan lingkungannya	<p>a) Mewujudkan Interaksi Masyarakat Yang Efisien (Community)</p> <p>1) Meningkatkan kualitas Pembinaan kegiatan kepemudaan dan kepramukaan.</p> <p>2) Meningkatkan peran masyarakat dalam ketahanan ekonomi, sosial dan budaya termasuk dalam pembangunan <i>smart city</i>.</p> <p>3) Meningkatkan <i>event</i>/aktivitas seni dan budaya.</p> <p>4) Meningkatkan pembinaan terhadap komunitas yang berseberangan dengan ideologi dan nilai-nilai Pancasila.</p>	Misi ke 2	<p>Mengembangkan sumber daya manusia yang semakin berkualitas dan terproteksi dalam jaminan sosial</p>	<p>Meningkatnya Keberdayaan Gender dan Perlindungan Anak</p>
		<p>b) Membangun Ekosistem Belajar yang Efisien (Learning)</p> <p>1) Meningkatkan pelayanan umum perpustakaan berbasis teknologi informasi.</p>	Misi ke 2	<p>Mengembangkan sumber daya manusia yang semakin berkualitas</p>	<p>Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan Masyarakat</p>

		<ul style="list-style-type: none"> 2) Meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan. 3) Meningkatkan kualitas pengelolaan arsip dengan mengembangkan SIKD. 4) Mengembangkan kurikulum bermuatan lokal. 5) Mengembangkan pengelolaan sistem data gender dan anak. 6) Meningkatkan layanan data KPAD dan FAD untuk Pemenuhan Hak Anak. 7) Mengembangkan SIMP TK untuk meningkatkan kualitas pendidik & tenaga kependidikan 		<p>dan terproteksi dalam jaminan sosial</p>	
		<p>c) Mewujudkan Sistem Keamanan Masyarakat (<i>Security</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas bantuan sosial. 2) Meningkatkan pelayanan penanganan kejadian bencana. 3) Meningkatkan kualitas pelayanan bencana kebakaran. 4) Meningkatkan kualitas sistem informasi kebencanaan untuk penanggulangan bencana. 5) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dengan memanfaatkan aplikasi aduan secara <i>online</i>. 	Misi ke 4	<p>Mengembangkan Kemandirian Desa berbasis Potensi Lokal</p>	<p>Meningkatnya desa berstatus maju dan mandiri</p>

		6) Meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat tentang pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.			
Smart Environment	Mewujudkan Rembang yang ramah lingkungan, hijau, bersih, tangguh, dan berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat	a) Mengembangkan Program Proteksi Lingkungan (Protection) 1) Meningkatkan jumlah RTH. 2) Meningkatkan kualitas layanan ijin lingkungan berbasis TI. 3) Meningkatkan peran masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup. 4) Meningkatkan kualitas bangunan air/irigasi. 5) Meningkatkan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.	Misi Ke 3	Membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
		b) Mengembangkan Tata Kelola Sampah dan Limbah (Waste) 1) Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi izin TPS dan limbah B3. 2) Meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah. 3) Mengembangkan sistem pengelolaan persampahan.	Misi Ke 3	Membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

		<p>c) Mengembangkan tata Kelola Energi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan peran pemerintah Kabupaten Rembang (melalui BUMD) dan pihak ketiga dalam pengelolaan energi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan sistem informasi teknologi. 2) Meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka mengoptimalkan pengembangan energi alternatif berbasis teknologi. 3) Memanfaatkan teknologi untuk mengefisienkan penggunaan energi. 4) Menggali potensi dan pemanfaatan sumber energi alternatif untuk memenuhi kebutuhan energi rumah dan industri. 	Misi Ke 3	Membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	
--	--	---	-----------	---	--

BAB III
STRATEGI PEMBANGUNAN REMBANG SMART CITY

Membangun Kabupaten Rembang dengan menerapkan konsep *smart city* memerlukan pendekatan yang komprehensif yang terintegrasi kedalam satu kesatuan (sistem dengan satu tujuan pokok, yakni melayani semua kebutuhan masyarakat dengan cepat, tepat, ramah dan memuaskan, dengan bertumpu pada pemanfaatan teknologi informasi secara maksimal. Selain itu membangun Rembang *Smart City* tidaklah mudah. Sehingga dalam hal ini sangat diperlukan komitmen yang tinggi dari pemerintahan daerah maupun masyarakat dalam implementasi Rembang *Smart City*.

Ada beberapa landasan yang dianggap sebagai syarat untuk membangun *Smart City*, adalah:

1. Peran Pemerintah, artinya Pemerintah berperan penting dalam mewujudkan terciptanya *Smart City* melalui penetapan perencanaan, menetapkan regulasi (peraturan) yang diperlukan, merencanakan pembiayaan, membangun sistem dan infrastruktur yang berbasis teknologi, serta melakukan pengelolaan.
2. Dukungan Masyarakat, artinya masyarakat sangat berperan dalam mewujudkan terciptanya *Smart City*.
3. Pembiayaan, sebuah teknologi yang canggih dirasakan sangat bermanfaat bagi semua kehidupan manusia. Namun untuk membangun teknologi yang canggih membutuhkan biaya yang sangat besar. Pemerintah daerah yang ingin membangun *Smart City* berbasis teknologi informatika dan komunikasi harus memikirkan, merencanakan dan menggambarkan biayanya. Biaya tersebut harus dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
4. Teknologi, semakin meningkatnya kebutuhan manusia akan pelayanan administrasi pemerintahan, mengakibatkan sektor pelayanan publik dari Pemerintah harus mampu memberikan pelayanan yang lebih cepat, mudah dan murah.

Berdasarkan uraian hasil analisa kondisi eksisting ada hal yang menjadi dilema untuk implementasi Rembang *Smart City*, yaitu:

1. Ketersediaan anggaran APBD untuk menyelenggarakan *Smart City*.
2. Ketersediaan perangkat Pusat Data dan Aplikasi untuk menyelenggarakan *Smart City*.
3. Kondisi ASN yang memadai untuk menyelenggarakan *Smart City*.
4. Aturan yang ada tidak memadai untuk mendukung inovasi *Smart City*

Dalam melakukan strategi pembangunan *Smart City*, beberapa ahli mengutarakan bahwa menciptakan kota yang cerdas merupakan suatu hal yang kompleks, membutuhkan proses jangka panjang, dan keberhasilannya tergantung pada komitmen berkelanjutan untuk aksi yang jelas, antara lain:

1. Kepemimpinan terpadu
2. Visi inspirasi yang jelas
3. Satu atah strategi dan tujuan yang jelas
4. Penciptaan model tata kelola yang sesuai dan dapat diterima
5. Perkembangan kasus bisnis dan penilaian ekonomi untuk menilai dampak dari pembangunan.
6. Sebuah pemahaman yang jelas tentang pembangunan perkotaan, transportasi dan infrastruktur strategi dan model regenerasi.
7. Sebuah pemahaman yang menyeluruh tentang bagaimana teknologi dapat diintegrasikan seluruh fungsi di Kabupaten Rembang untuk menciptakan sinergi dan wawasan baru.
8. Apresiasi saat ini dan muncul praktek terbaik dalam penggunaan sistem cerdas dalam layanan, infrastruktur, dan bangunan.
9. Apresiasi konteks dan pemahaman tentang kepentingan *stakeholders*, budaya dan adat istiadat setempat dapat memiliki pengaruh besar pada apa yang dapat diterima.
10. Pemahaman tentang kepemilikan, keselamatan, keamanan dan penggunaan data serta model pendanaan untuk infrastruktur baru.

Strategi untuk kota cerdas juga harus mencakup:

1. Komunikasi yang jelas
2. Sebuah visi pemersatu melalui siklus hidup.

3. Integrasi dengan kebijakan dan struktur tata kelola.
4. Pemahaman holistik yang jelas tentang bagaimana data ditransfer dan ditangkap antara teknologi dan sistem dan bagaimana ia digunakan oleh pengambil keputusan.

Untuk menentukan strategi yang harus dilakukan untuk implementasi Rembang *Smart City*, telah dilakukan analisa SWOT dari kombinasi antara hasil analisa GAP indikator program pembangunan daerah yang termuat pada RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2021-2026 dengan hasil analisa kondisi masa depan serta hasil analisa kesiapan daerah, dengan hasil sebagai berikut:

3.1. *Smart Governance*

Rembang *Smart Governance* merupakan salah satu wujud nyata untuk mendukung Kabupaten Rembang menuju Rembang *Smart City*. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Rembang perlu memperhatikan 3 (tiga) peran utama pemerintah yang menggerakkan *smart government*, yaitu :

1. Memberikan layanan untuk kesejahteraan masyarakat;
2. Sebagai regulator untuk meningkatkan daya saing kota
3. Menyelenggarakan pemerintahan yang efektif dan efisien

Sasaran dari *smart governance* Kabupaten Rembang adalah mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, transparan dan akuntabel serta terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu. *Smart governance* harus dapat diimplementasikan ke dalam 3 (tiga) unsur tata kelola, yaitu pelayanan publik (*public service*), birokrasi (*bureaucracy*), dan kebijakan (*policy*).

1. Pelayanan Publik (*public service*)
 - a. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan menggunakan teknologi informasi.
 - b. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana perijinan serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi.
 - c. Peningkatan administrasi kependudukan, pencatatan sipil

- dan pengembangan hayati berbasis teknologi.
- d. Pengembangan sumber daya manusia berbasis teknologi informasi.
 - e. Peningkatan kualitas penanganan perijinan berbasis teknologi.
 - f. Integrasi layanan kesehatan masyarakat di RS/ Puskesmas/Fasilitas Kesehatan Lainnya.
 - g. Peningkatan kualitas media informasi kesehatan dan pengaduan layanan berbasis teknologi informasi.
 - h. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana UKPBJ berbasis teknologi informasi.
 - i. Penyediaan aplikasi data base ketenaga-kerjaan.
 - j. Peningkatan kualitas pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal.
 - k. Peningkatan kesadaran dan budaya tertib administrasi di masyarakat.
 - l. Sosialisasi pentingnya dokumen kependudukan masyarakat.
2. Manajemen Birokrasi yang Efisien
- a. Peningkatan kualitas pengelolaan dan pemanfaatan komponen IT dalam penyelenggaraan pemerintahan.
 - b. Pengembangan aplikasi yang terintegrasi, uji keamanan, *upgrade* perangkat TIK dan evaluasi.
 - c. Mensosialisasikan aplikasi yang dimiliki pemerintah.
 - d. Peningkatan kapasitas OPD dan Desa dalam SISWADA.
 - e. Peningkatan kapasitas pengelola pasar dan UP2K PKK.
 - f. Peningkatan Aksesibilitas Data dan Informasi Kepegawaian.
 - g. Peningkatan kualitas sistem keamanan aplikasi Pemerintah Kabupaten.
 - h. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi untuk tata kelola birokrasi yang transparan dan bertanggungjawab.

3. Efisiensi Kebijakan Publik

- a. Pengembangan sistem informasi kebijakan Publik yang interaktif, informatif, komunika-tif dan Partisipatif berbasis IT.
- b. Mensosialisasikan kebijakan dan data statistik yang dapat diakses masyarakat berbasis IT.
- c. Peningkatan kinerja penunjang urusan pemerintah kabupaten sektor pertanian.
- d. Peningkatan peran pemerintah dalam mendukung pembangunan *smart city*.
- e. Penyusunan kebijakan publik yang informatif, komunikatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- f. Mensosialisasikan kebijakan dan data statistik yang dapat diakses masyarakat berbasis IT

3.2. Smart Branding

Smart branding merupakan inovasi dalam memasarkan Kabupaten Rembang sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah dengan mengembangkan tiga elemen, yaitu pariwisata, bisnis, dan wajah kota. Strategi *smart branding* akan dilakukan dengan beberapa strategi sebagai berikut:

1. Membangunan dan Memasarkan Ekosistem Pariwisata (*Tourism Branding*),
 - a. Pengembangan sistem informasi pariwisata untuk meningkatkan kunjungan wisnus, wisman dan wisata religi.
 - b. Pengembangan seni tradisi menjadi daya tarik wisata.
 - c. Peningkatan pelestarian cagar budaya.
 - d. Perencanaan dan pembangunan wajah kota
 - e. Pengembangan keunikan dan kekhasan potensi pariwisata untuk menghadapi persaingan
 - f. Peningkatan kreatifitas dan inovasi event-event pariwisata
2. Ekosistem Bisnis Daerah (*Business Branding*)
 - a. Pengembangan usaha mikro berbasis teknologi.
 - b. Pengembangan potensi produk dalam negeri untuk masuk pasar rakyat dan retail modern

- c. Peningkatan/pengembangan pasar sesuai peraturan perundangan.
 - d. Peningkatan promosi investasi sektor ekonomi strategis melalui teknologi informasi.
 - e. Peningkatan CSR perusahaan dalam mendukung *smart city*.
 - f. Peningkatan daya saing usaha mikro sesuai standar mutu produk untuk bersaing dengan Negara/kota yang lain.
 - g. Pengembangan kapasitas pengelola pasar.
 - h. Kebijakan yang mendukung iklim investasi
3. Membangun dan Memasarkan Wajah Kota (*City Appearance Branding*)
- a. Pembangunan ruang publik yang indah, rapi dan nyaman untuk mendukung pariwisata
 - b. Penataan koridor, *nodes* dan *landmark* yang mencerminkan arsitektur lokal untuk mendukung pariwisata
 - c. Peningkatan sistem keamanan dan pengawasan ruang terbuka berbasis IT
 - d. Peningkatan koordinasi antar Perangkat Daerah untuk menangani PKL dalam mendukung pengembangan wajah kota

3.3. *Smart Economy*

Smart economy dalam *smart city* dimaksudkan untuk mewujudkan ekosistem perekonomian di Kabupaten Rembang yang mampu memenuhi tantangan di era informasi yang disruptif dan menuntut tingkat adaptasi yang cepat serta era *financial literacy* melalui beberapa program diantaranya mewujudkan *less-cash society* dengan mengembangkan 3 (tiga) elemen *smart economy*, yaitu; ekosistem industry, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan ekosistem transaksi keuangan.

- 1. Membangun ekosistem Industri yang Berdaya Saing
 - a. Pengembangan industri pengolahan perikanan berbasis IPTEK.
 - b. Pengembangan ekonomi kreatif dan usaha koperasi berbasis IPTEK

- c. Pengembangan usaha industri (produksi, pengolahan, *packaging* dan pemasaran) berbasis IPTEK untuk meningkatkan standar mutu dan daya saing produk.
 - d. Peningkatan kordinasi perangkat daerah untuk mempercepat proses perijinan berbasis teknologi informasi.
 - e. Peningkatan & pengem-bangan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana pertanian.
 - f. Penyediaan & pengembangan sistem informasi pengelolaan pelelangan yang terintegrasi.
 - g. Pengembangan sistem pemasaran olahan perikanan *online*
 - h. Komitmen Pemerintah melalui kebijakan kemudahan investasi
 - i. Peningkatan koordinasi Perangkat Daerah untuk mengembangkan sektor ekonomi strategis berbasis IT.
2. Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat
- a. Peningkatan penyediaan sarana dan monitoring kebutuhan bahan pokok terutama beras.
 - b. Pengembangan sektor industri berbasis teknologi (*technopreneurship*)
 - c. Peningkatan jumlah wirausaha untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
 - d. Pengarusutamaan gender (PUG) & kelembagaan untuk kelengkapan data.
 - e. Pengembangan sistem informasi pendataan Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.
 - f. Peningkatan peran BLK dan LPK untuk menyiapkan tenaga kerja terampil dalam mendukung tumbuhnya industri *manufacturing*.
 - g. Peningkatan diversifikasi *skill* tenaga kerja untuk berdaya saing dengan tenaga kerja dari wilayah sekitar.
3. Membangun Ekonomi Transaksi Keuangan
- a. Kerjasama dengan sektor *finance* dalam Penerapan *Less Cash*

Society.

- b. Pembuatan sistem informasi performance UKM untuk akses pembiayaan.
- c. Pengembangan pemasaran (*ecommerce*) dan pembiayaan UKM berbasis IT.
- d. Peningkatan kapasitas lembaga keuangan dalam menghadapi persaingan pasar bebas.
- e. Peningkatan kinerja koperasi dalam mendukung UKM menghadapi pasar bebas.

3.4. Smart Living

Smart living menjadi salah satu dimensi dalam *smart city* untuk menjamin kelayakan taraf hidup masyarakat didalamnya. Kelayakan taraf hidup ini dapat dinilai dari 3 (tiga) elemen, yaitu; kelayakan pola hidup, kelayakan kualitas kesehatan, dan kelayakan moda transportasi untuk mendukung mobilitas orang dan barang di dalam sebuah *smart regency*.

1. Harmonisasi Tata Ruang Wilayah
 - a. Penataan bangunan & lingkungan sesuai dengan pemanfaatannya.
 - b. Penerapan perda RTRW untuk mewujudkan permukiman yang harmonis.
 - c. Peningkatan penanganan kawasan permukiman kumuh & pengembangan perumahan.
 - d. Pembangunan hunian berimbang dan peningkatan PSU.
 - e. Peningkatan dan pengembangan panjang pedestrian serta kawasan perkantoran.
 - f. Perencanaan tata ruang berbasis mitigasi bencana.
 - g. Penerapan *zero growth* untuk kawasan yang *vulnerable* (kawasan rentan).
2. Mewujudkan Prasarana Kesehatan (*Health*)
 - a. Peningkatan kualitas dan pengembangan sarana prasarana

- kesehatan.
- b. Peningkatan budaya hidup sehat dengan memanfaatkan teknologi informasi.
 - c. Penyediaan fasilitas telekonsultasi pada Puskesmas.
 - d. Pengintegrasian sistem informasi layanan Keluarga Berencana.
 - e. Pengintegrasian layanan rujukan BPJS kesehatan.
 - f. Pengembangan sistem informasi Data PMKS.
 - g. Pengembangan ARJUNO untuk penyediaan aplikasi sistem informasi penanganan kegawatandaruratan maternal.
 - h. Pengembangan SIMRS untuk aplikasi *e-office* bagi jajaran struktural RS.
 - i. Pengembangan SIMRS untuk penyediaan rekam medis elektronik.
 - j. Peningkatan ketersediaan obat, alat kesehatan dan makanan minuman.
 - k. Peningkatan derajat kesehatan dengan pemanfaatan sarana prasarana kesehatan yang memadai.
3. Menjamin Ketersediaan Sarana Transportasi
- a. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi darat sesuai dengan perkembangan teknologi untuk memenuhi kebutuhan transportasi individu, publik, logistik dan pariwisata.
 - b. Peningkatan kegiatan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan.
 - c. Penyediaan perlengkapan jalan.
 - d. Penyediaan angkutan umum.
 - e. Kerjasama penyediaan jasa transportasi publik dengan kabupaten/kota tetangga.
 - f. Penyediaan pelayanan dan kemudahan akses sarana transportasi darat, sesuai tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan transportasi yang mudah

3.5. *Smart Society*

Tujuan *smart society* sebagai bagian dari *smart city* merupakan dimensi yang banyak membahas tentang manusia sebagai unsur utama sebuah kota. Di dalam *smart city*, interaksi antar manusia telah bergerak menuju ekosiste sosio-teknis dimana dimensi fisik dan virtual dari kehidupan masyarakat semakin terjalin intensif. Interaksi antar warga terjalin dengan semakin kuat dan tanpa sekat dengan mediasi teknologi sehingga terbentuk *digital literacy* yang tinggi. Hal ini dapat diwujudkan dengan pengembangan 3 (tiga) elemen *smart society*, yaitu Interaksi Masyarakat, ekosistem pembelajaran, dan system keamanan.

1. Mewujudkan Interaksi Masyarakat Yang Efisien (*Community*)
 - a. Peningkatan pembinaan kegiatan kepemudaan dan kepramukaan.
 - b. Peningkatan peran komunitas masyarakat untuk mendukung pembangunan daerah.
 - c. Peningkatan peman-faatan teknologi informasi untuk event-event/aktivitas seni dan budaya.
 - d. Peningkatan kualitas & kuantitas fasilitas kesenian & kebudayaan.
 - e. Peningkatan kapasitas organisasi masyarakat daerah dalam mendukung *smart city*.
 - f. Pembinaan terhadap komunitas yang berseberangan dengan ideologi dan nilai-nilai Pancasila.
 - g. Penyediaan fasilitas kesenian dan kebudayaan yang memadai untuk pengembangan komunitas.
 - h. Peningkatan pembinaan dan pengawasan komunitas.

2. Membangun Ekosistem Belajar Yang Efisien
 - a. Peningkatan kualitas pelayanan perpustakaan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
 - b. Peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan untuk

- menuntaskan wajib belajar 12 tahun.
 - c. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan yang berbasis teknologi.
 - d. Peningkatan partisipasi dan mengurangi angka putus sekolah untuk menuntaskan wajib belajar 12 tahun, melalui optimalisasi dana BOS dan PKBM.
 - e. Pemanfaatan e-literasi untuk meningkatkan minat baca masyarakat.
 - f. Penyediaan & pemeliharaan sistem informasi pengelolaan Sistem Informasi Kearsipan Daerah (SIKD).
 - g. Peningkatan kapasitas SDM untuk tenaga operator (SIKD).
 - h. Penerapan kurikulum muatan lokal berbasis teknologi informasi.
 - i. Pengembangan sistem informasi pengelolaan data gender dan anak.
 - j. Peningkatan layanan penyediaan data anak.
 - k. Peningkatan penyediaan layanan Data KPAD dan FAD.
 - l. Pengembangan sistem informasi manajemen pendidikan dan tenaga kependidikan (SIMP TK).
 - m. Peningkatan mutu dan manajemen penyelenggaraan pelayanan pendidikan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi.
 - n. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas perpustakaan dan pendidikan bagi seluruh masyarakat.
3. Mewujudkan Sistem Keamanan Masyarakat
- a. Peningkatan kualitas dan kuantitas bantuan
 - b. Peningkatan kualitas penanganan kejadian bencana
 - c. Peningkatan response time kebakaran
 - d. Penyediaan sistem informasi kebencanaan
 - e. Penyediaan aplikasi aduan masyarakat secara *online* tentang gangguan ketentraman dan ketertiban umum
 - f. Peningkatan peran lembaga non pemerintahan untuk mengurangi fenomena pemanasan global dan perubahan iklim

- g. Peningkatan kesadaran dan peran masyarakat untuk mengurangi fenomena pemanasan global dan perubahan iklim

3.6. *Smart Environment*

Dimensi keenam dalam sebuah *smart city* adalah pengelolaan lingkungan yang pintar, dimana yang dimaksud dengan pintar adalah adanya perhatian bagi lingkungan hidup dalam pembangunan kota yang sama besarnya dengan perhatian yang diberikan terhadap pembangunan infrastruktur fisik maupun pembangunan bagi sarana dan prasarana bagi warga, untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan menjadikan elemen teknologi sebagai pendorongnya. Hal ini dapat diwujudkan dengan pengembangan 3 (tiga) elemen *smart environment*, yaitu: Proteksi lingkungan (*Protection*), pengelolaan Sampah dan Limbah (*Waste*), dan pengelolaan Energi (*Energy*).

1. Mengembangkan Program Proteksi Lingkungan
 - a. Peningkatan jumlah RTH.
 - b. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi untuk layanan perijinan.
 - c. Peningkatan peran pemerintah, lembaga dan masyarakat dalam menangani kelestarian lingkungan.
 - d. Peningkatan kualitas bangunan air/irigasi dengan.
 - e. Peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan
 - f. Penegakan regulasi lingkungan hidup pada sektor industri untuk menjaga kualitas lingkungan hidup
 - g. Peningkatan sistem tata kelola sumber daya tanah, air, dan udara.

2. Tata Kelola Sampah dan Limbah
 - a. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi ijin TPS limbah B3.
 - b. Peningkatan peran masyarakat dalam penanganan

- persampahan dan limbah.
 - c. Peningkatan kuantitas & kualitas sarana dan prasarana persampahan dan drainase yang layak.
 - d. Peningkatan kualitas manajemen pelayanan penanganan sampah, limbah dan sistem drainase berbasis teknologi.
 - e. Peningkatan gerakan budaya *zero waste* di tempat-tempat strategis.
 - f. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah dan limbah.
3. Mengembangkan Tata Kelola Energi Yang Bertanggung-jawab
- a. Komitmen pemerintah Kabupaten Rembang (melalui BUMD) dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan sitem informas teknologi dalam pengelolaan energi yang bertanggungjawab.
 - b. Pengembangan energi alternatif berbasis teknologi.
 - c. Pemanfaatan teknologi untuk efisiensi penggunaan energy.
 - d. Pengembangan potensi sumber energi alternatif untuk memenuhi kebutuhan energi rumah industry.
 - e. Peningkatan pemanfaatan energi alternatif untuk menghadapi isu krisis energy.

BAB IV
RENCANA AKSI REMBANG SMART CITY

4.1. Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan *Smart City*

1. Kebijakan

Kebijakan memegang peranan penting dalam pembangunan *Smart City*. Kebijakan menjadi pedoman dan arah pengembangan *smart city* yang akan dilaksanakan secara berkesinambungan. Kebijakan *Smart City* Kabupaten Rembang dengan rencana aksi meliputi:

- a. Penetapan arah dan tujuan pengembangan *smart city* yang selaras dengan dokumen perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan daerah.
- b. Tersedianya program pengembangan (*masterplan*) Rembang *Smart City* yang meliputi: *smart governance*, *smart branding*, *smart living*, *smart economy*, *smart society* dan *smart environment*.
- c. Menetapkan program *quick wins* sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah untuk jangka pendek dan menengah, dengan mempertimbangkan integrasi dan sinergi antar Perangkat Daerah.
- d. Alokasi pembiayaan program pengembangan *Smart City*.
- e. Kerjasama pengembangan *smart city* dengan pihak ketiga, antara lain: dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang sejalan dengan kebijakan *smart city*.
- f. Melakukan pengendalian dan evaluasi secara berkala dengan berpedoman pada target yang telah ditetapkan dalam *Masterplan Rembang Smart City*.
- g. Pengembangan regulasi dan tata kelola terkait standar dan tata cara, standar, atau pengaturan dalam pengembangan dan implementasi *smart city*, yang meliputi:
 - 1) Pembuatan Peraturan Bupati tentang *Masterplan Smart*

City.

- 2) Pengembangan regulasi terkait telekomunikasi publik.
- 3) Penyusunan Tata Kelola Keamanan Informasi.
- 4) Penyusunan SOP strategi backup sistem dan pemulihannya.
- 5) Penyusunan SOP Keamanan Infrastruktur Fisik TIK.
- 6) Penyusunan tata kelola pemanfaatan berbagi pakai data (interoperabilitas).

2. Kelembagaan

Tahapan implementasi *Smart City* Kabupaten Rembang terkait penataan kelembagaan dengan rencana aksi meliputi:

- a. Pembentukan kelembagaan Dewan Smart City. Dewan Smart City merupakan lembaga multi pihak yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang bertugas untuk membantu pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi sebagai pengelola *Smart City*. Pembentukan Dewan Smart City Daerah berfungsi sebagai wadah partisipasi antar sektor dan antar elemen dalam melakukan percepatan pembangunan dan pelaksanaan *Smart City* sebagaimana yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Daerah di dalam *Masterplan* (Rencana Induk) *Smart City*.

Dewan Smart City memiliki tugas dan kewajiban:

- 1) Memberikan arahan aspek strategis Teknologi Informasi dalam *Smart City* dan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi;
- 2) Memberikan masukan kepada Tim Pelaksana *Smart City* Kabupaten Rembang terkait pelaksanaan program dan kegiatan *Smart City* di Kabupaten Rembang;
- 3) Menampung dan membahas usulan, kebutuhan dan aspirasi OPD;
- 4) Memberikan rekomendasi kebijakan kepada Bupati untuk mendorong terjadinya percepatan pembangunan dan pelaksanaan *Smart City* di Kabupaten Rembang;

- 5) Menerima saran dan masukan dari masyarakat terkait percepatan pembangunan dan pelaksanaan *Smart City* di Kabupaten Rembang;
 - 6) Melaksanakan rapat koordinasi dengan Tim Pelaksana *Smart City* Kabupaten Rembang terkait pelaksanaan program dan kegiatan *Smart City*;
 - 7) Membahas hasil asesmen/audit internal dan independen sebagai materi evaluasi;
 - 8) Melakukan pelaporan kepada Bupati terkait perkembangan pelaksanaan *Smart City*.
- b. Pembentukan Tim Teknis *Smart City* berbasis kepakaran, keahlian, kompetensi, dan ketrampilan dengan menjalin kemitraan dengan dunia usaha, akademisi (perguruan tinggi) dan masyarakat;
 - c. Penyusunan kebijakan/regulasi tata kelola dan manajemen pengembangan *Smart City*;
 - d. Fasilitasi partisipasi publik dan strategi pelibatan para pemangku kepentingan (*citizen engagement*) dalam pembangunan/pengembangan *Smart City*;
 - e. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM aparatur pemerintah;
 - f. Penerapan norma, etika, dan budaya setempat secara professional;
 - g. Fasilitasi pendidikan dan pelatihan digital masyarakat (literasi digital).

Untuk kelembagaan, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika bahwa telah terbentuk Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Rembang yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Selain itu Pemerintah Kabupaten Rembang memiliki berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan tugas

pokok dan fungsi masing-masing. Dalam pemanfaatan TIK, antar OPD akan memiliki kepentingan teknis dan administrasi masing-masing, maka perlu diatur koordinasinya untuk bisa bersinergi dalam rangka memenuhi semua kebutuhan TIK. Semua OPD selain Dinas KOMINFO merupakan pemilik data/informasi dan proses birokrasinya menggunakan sarana prasarana TIK.

4.2. Rencana Pembangunan Infrastruktur Pendukung *Smart City*

Salah satu aspek utama dalam implemetasi *smart city* adalah dukungan teknologi informasi. Teknologi informasi diperlukan pembangunan kota yang digital dan terintegrasi dengan dukungan infrastruktur fisik, teknologi pintar, perangkat mobilitas tinggi dan jaringan komputer yang memadai.

Lingkup 6 (enam) dimensi *Smart City* dengan landasan pemanfaatan teknologi informasi mencakup:

1. *Smart Governance*. Kemampuan pemerintah mengelola dan mengendalikan pemanfaatan TI dalam rangka pengembangan dan penerapan *smart city*.
2. *Smart Branding*. Pemanfaatan teknologi informasi untuk memperkenalkan potensi daerah
3. *Smart Economy*. Pemanfaatan TI untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang produktif dan berdaya saing (*city branding*)
4. *Smart Living*. Pemanfaatan TI dalam pengelolaan sumber daya alam secara cerdas sehingga tidak menimbulkan dampak lingkungan yang merugikan.
5. *Smart Society*. Pemanfaatan TI terhadap kualitas manusia dari segi pengetahuan dan keterampilan
6. *Smart Environment*. Pemanfaatan TI dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat pada suatu wilayah.

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi

pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *E-Government*, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Oleh karena itu infrastruktur pendukung yang perlu benar-benar dipersiapkan adalah: 1). *Data center*, 2). Jaringan (*network*), 3). Pusat Kendali Jaringan dan Data, 4). Pusat Kendali Operasi (*Operation Control Center*), 5). *Disaster Recovery Center*, dan 6). *Command Center*.

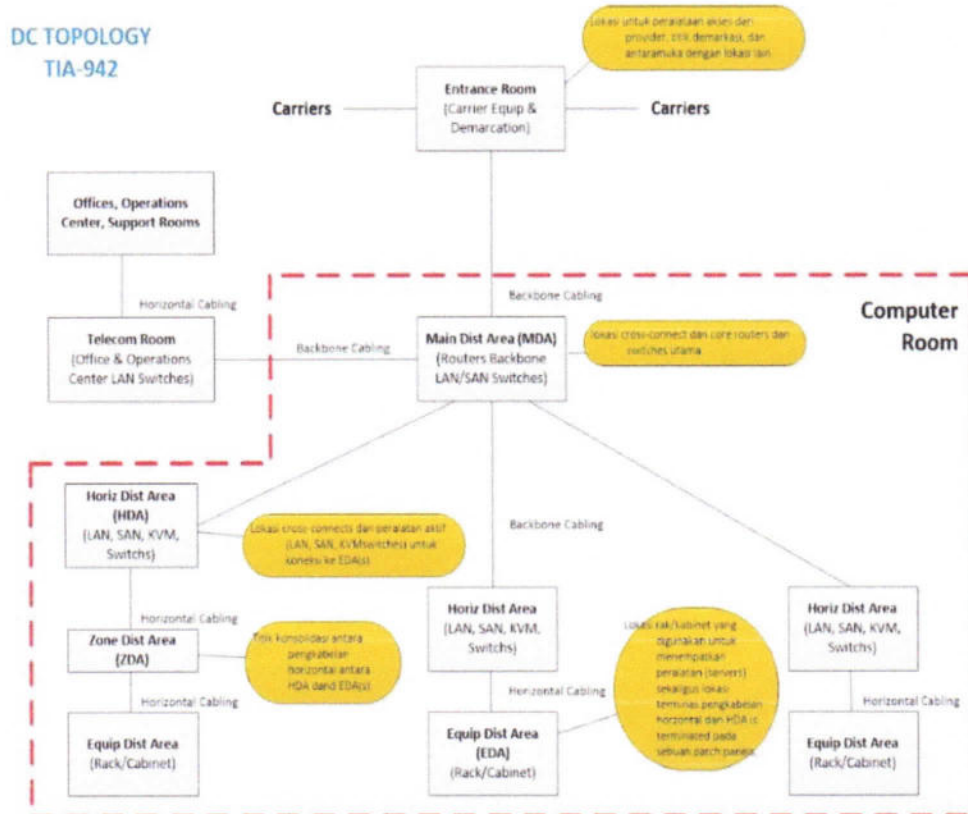
1. *Data Center* (Pusat Data)

Data center yang handal diperlukan untuk mendukung implementasi *Smart City*. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang nantinya akan menjadi pusat *leading sector* pengelolaan teknologi informasi, selayaknya perlu dibangun *data center* yang handal untuk menampung semua *server* dari semua dinas dan lembaga yang ada di Pemkab Rembang. Dengan *data center* terpusat yang terpusat mempunyai keuntungan:

- a. Dinas-dinas atau lembaga pemerintahan dapat lebih fokus pada tugas utamanya dan meminimalkan kompleksitas IT
- b. Dinas tidak lagi dipusingkan dengan masalah *server crash*, pemutakhiran teknologi ataupun *hardware*, *cabling*, *connection*, dan proses pemeliharaannya.

Topologi *data center* sesuai TIA-942 (*Telecommunication*

Industry Association) adalah sebagai berikut:



Gambar IV.1 Topologi Data Center

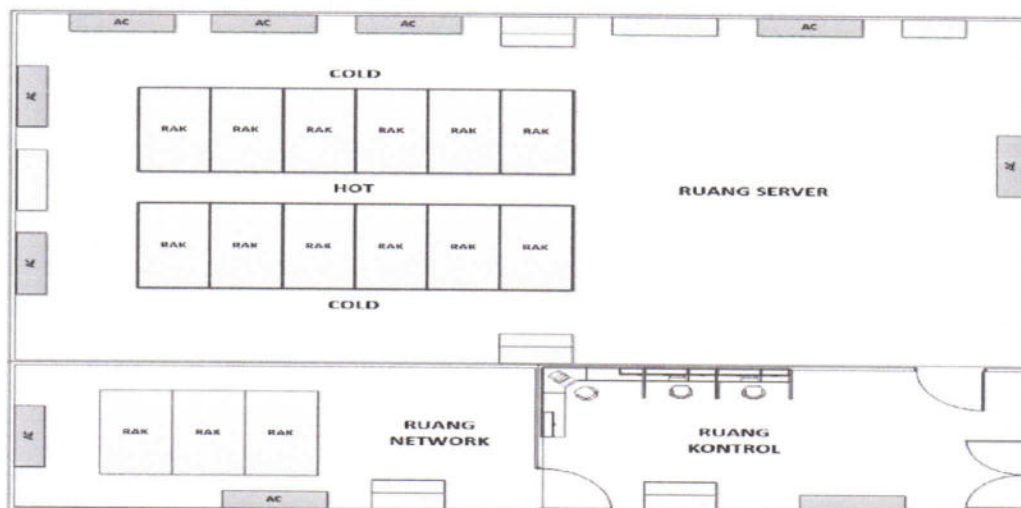
Keterangan :

- a. *Entrance Room* (ER), lokasi untuk peralatan akses dari *provider*, titik demarkasi, dan antaramuka dengan lokasi lain.
- b. *Main Distribution Area* (MDA), lokasi *cross-connect* dan *core routers* dan *switches* utama.
- c. *Horizontal Distribution Area* (HDA), lokasi *cross-connects* dan peralatan aktif (LAN, SAN, KVM switches) untuk koneksi ke *Equipment Distribution Area* (EDA).
- d. *Zone Distribution Area* (ZDA), titik konsolidasi antara pengkabelan horizontal antara HDA dan EDA.
- e. *Equipment Distribution Area* (EDA), lokasi rak/kabinet yang digunakan untuk menempatkan peralatan (*servers*) sekaligus lokasi terminal pengkabelan horizontal dari HDA yang diberakhir di *patch panels*.



Gambar IV.2 Kondisi Eksisting Data Center Pemerintah Kabupaten Rembang

Untuk pengembangan *data center*, perlu ada pemisahan dalam ruang *data center* sesuai dengan fungsinya. Sekat ruangan untuk membagi ruangan bisa dibuat permanen atau tidak yang penting bisa menutup rapat ruangan dari ruang komputer. Hal ini agar sistem pendingin ruangan dapat bekerja maksimal, Sebagaimana Gambar IV.3



Gambar IV.3 Desain Layout Data Center Sesuai Standart
Keterangan:

- a. *Electrical Room* (Ruang Listrik), Ruang Panel Listrik dan UPS, sebaiknya terpisah dari ruang *server* untuk menghindari interferensi elektromagnetik.

- b. *Network & Communication Room*, pusat dari semua *structured cabling* berakhir.
 - c. *Loading Dock*, area tempat menerima semua peralatan yang baru datang untuk *Data Center*.
 - d. *Staging Area*, area untuk *System Administrator* dan *Network Engineer* melakukan *setup* dan konfigurasi peralatan yang akan digunakan di *Data Center*.
 - e. *Storage Room*, area untuk menyimpan peralatan *Data Center* dalam jangka waktu yang lama seperti suku cadang.
 - f. *Operation Command Center/Control Room*, area untuk semua *System Engineer* dan *Network Engineer* melakukan pengawasan terhadap operasional *Data Center*.
 - g. *Backup Room*, ruang kerja bagi personel tambahan, seperti *vendor* yang melakukan *Backup* dan *Monitoring Server* dan peralatan-peralatan terkait di *Data Center*.
 - h. *Vendor Service Area*, ruang khusus untuk semua *vendor* dalam melakukan pekerjaan yang cukup signifikan di dalam *Data Center*, untuk menghindari terlalu lamanya mereka berada di dalam *Data Center*.
2. Jaringan (*Network*)

Secara umum rancangan *network* harus memperhatikan beberapa kriteria sebagai berikut:

a. *Availability*

Ketersediaan (*availability*) suatu jaringan ditentukan oleh kebutuhan *availability* aplikasi yang menggunakannya. Mekanisme yang digunakan untuk menyediakan *level of availability* adalah:

- 1) *Redundant component* : perangkat jaringan didesain membutuhkan lebih dari satu komponen secara internal.
- 2) *Clustering* : pemisahan secara logis dan/atau fisik berdasarkan kepentingan bisnis organisasi.
- 3) *Hot stanby devices/servers* : penyediaan *router*, *switch*, *firewalls* lebih dari satu untuk menjaga tingkat layanan

jaringan.

- 4) *No single point of failure* : desain keseluruhan komponen jaringan sehingga mencegah adanya satu perangkat, jalur, dan *layer* jaringan yang memungkinkan berkurangnya *availability* jaringan secara keseluruhan.

b. *Security*

Teknologi informasi harus bisa membatasi penggunaannya hanya pada pihak yang memiliki wewenang saja. Keamanan informasi (*security*) suatu jaringan ditentukan oleh tingkat kritikalitas, sensitivitas, dan kerahasiaan informasi yang melalui jaringan.

c. *Scalability*

Kemampuan suatu teknologi yang memungkinkan teknologi tersebut menangani pertumbuhan beban secara baik atau kemampuan teknologi tersebut dikembangkan/ditambahkan secara cepat.

Aspek skalabilitas jaringan dapat dicapai dengan penggunaan *intelligent networking devices* yang memungkinkan implementasi arsitektur jaringan berkembang/berubah terus menerus. Perangkat tersebut memudahkan perubahan dan peningkatan *routing*, dan *packet filtering* dan perubahan *throughput* jaringan.

d. *Manageability*

Kemampuan untuk memudahkan pengelolaan teknologi informasi. Tujuan utama manajemen *network* adalah pemetaan komponen infrastruktur *network* kepada layanan proses bisnis. *Network management* meliputi:

- 1) *Backup and Recovey*
- 2) *Service Monitoring and Control*
- 3) *Configuration Management*
- 4) *Debug and Test*
- 5) *Remote Administration*

e. *Performance*

Teknologi informasi harus memberikan peningkatan aliran informasi terbaik dan setiap komponen teknologi tersebut harus bekerja dalam kondisi terbaik dengan memperhatikan:

- 1) *Volume* : besarnya kapasitas penyimpanan
- 2) *Device speed* : kecepatan perangkat untuk penyimpanan data
- 3) *Network speed* : kecepatan jaringan yang ditentukan koneksi dan *interface* perangkat dan/atau *server port*
- 4) *Filtering* : proses seleksi yang dilakukan oleh *layer 3* OSI berhubung erat dengan kecepatan/kekuatan CPU perangkat seleksi tersebut. Semakin tinggi level/layer OSI proses filtering, biasanya kinerja semakin menurun.
- 5) *Encryption* : Penggunaan enkripsi adalah proses tambahan yang membebani kinerja *storage*.

f. *Supportability*

Teknologi informasi harus memiliki dukungan dari industry yang terlibat. Setiap perangkat yang ditambahkan dalam arsitektur jaringan akan menambah TCO (*Total Cost of Ownership*)

g. *Interoperability*

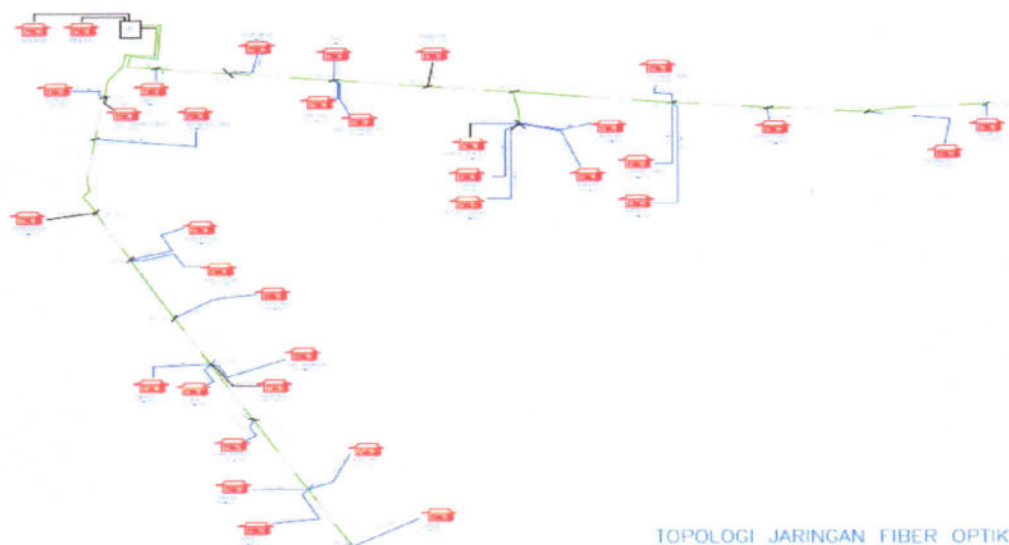
Yaitu kemampuan mudah bekerjasama dengan teknologi yang berbeda. Elemen dari arsitektur jaringan harus mampu saling interoperasi satu dengan lainnya dan dengan *architectural building-block* yang lain.

Jaringan tersusun atas beberapa virtual LAN sesuai dengan unit kerjanya. Pengelolaan dan *maintenance* perangkat jaringan sampai dengan *level router* perangkat daerah menjadi tanggung jawab Dinkominfo, sedangkan pengelolaan dan *maintenance* perangkat setelahnya (*switch, access point, LAN, dan PC/Laptop*) menjadi tanggung jawab pengelola TI di masing-masing Perangkat Daerah.

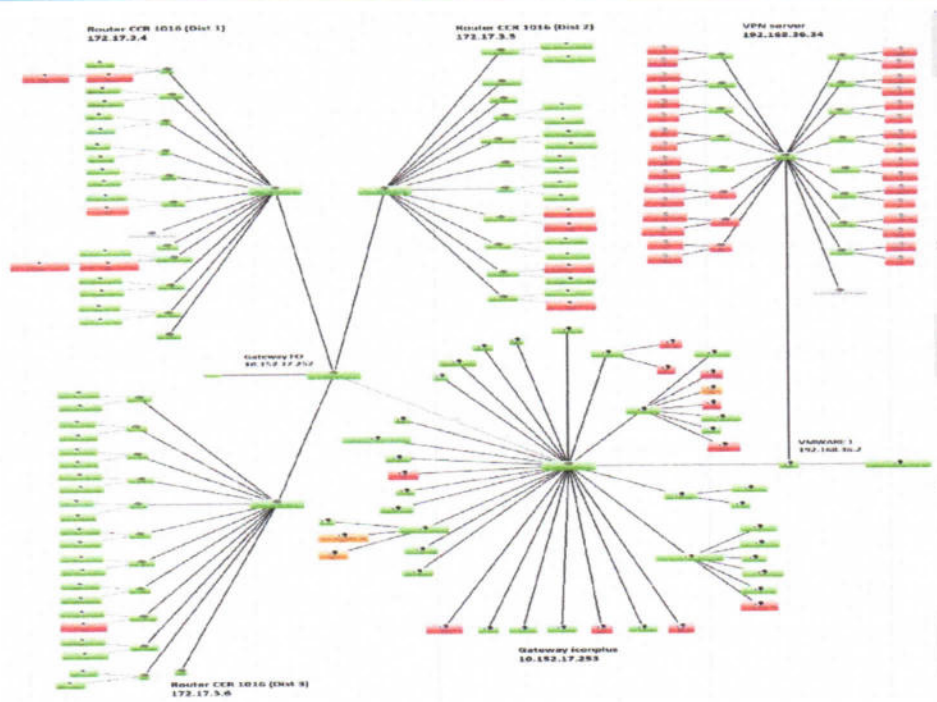
Ketersediaan jaringan telekomunikasi di Kabupaten

Rembang ada 2 (dua) yaitu untuk *government* dan untuk masyarakat. Jaringan telekomunikasi untuk *government* telah difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Rembang melalui Dinkominfo dengan penyediaan jaringan *fiber optic*. Jaringan *fiber optic* milik pemerintah Kabupaten Rembang untuk memfasilitasi penyediaan jaringan internet semua OPD yang berada di dalam Kota, sedangkan koneksi di semua kecamatan menggunakan indihome *fiber optic*. Berikut adalah topologi jaringan *fiber optic* pemerintah Kabupaten Rembang:

Internet service provider (ISP) yang saat ini dipakai oleh pemerintah Kabupaten Rembang adalah ICON+ dan backup ISP dari JSN (Jaringan Sarana Nusantara) dengan fasilitas IP transit.



Gambar IV.4 Topologi Jaringan Fiber Optic Pemerintah Kabupaten Rembang



Gambar IV.5 Manajemen Jaringan Pemerintah Kabupaten Rembang

3. Pusat Kendali Jaringan dan Data

Infrastruktur pusat kendali jaringan dan data dibangun untuk memudahkan pemantauan kondisi operasional pusat data dan jaringan intra pemerintah untuk menjamin ketersediaan (*availability*) seluruh infrastruktur pendukung *Smart City*.

4. Pusat Kendali Operasi (*Operation Control Center*)

Infrastruktur pusat kendali operasi *Smart City* merupakan fasilitas terpusat dimana seluruh sistem *Smart City* dapat dipantau. Pusat kendali operasi dilengkapi dengan berbagai tampilan yang menyajikan informasi *real-time* dari perangkat dan sistem yang tersebar di seluruh Rembang sehingga kondisi daerah dapat dipantau tanpa perlu menuju lokasi bersangkutan.

5. *Disaster Recovery Center*

Disaster Recovery Plan (DRP) dirancang untuk mengantisipasi terhadap kejadian tidak diinginkan, berupa gangguan sementara, sebagian maupun *total damage* yang terjadi pada *Data Center*. *DRP* perlu didukung oleh *DRC(Disaster Recovery Center)* sebagai sebagai tempat/area penyimpanan serta pengolahan data dan informasi pada saat terjadinya

bencana (*disaster*) hingga proses pemulihan dapat dilakukan.

Terdapat tiga tipe DRC sesuai dengan besaran anggaran yang diperlukan untuk membangun dan memeliharanya, yakni:

a. *Cold DRC*

Cold DRC ini menyediakan sistem yang sama seperti lokasi data center di organisasi dimana aplikasi dan data akan diupload sebelum fasilitas DRC bisa digunakan, namun proses pemindahan dari data center ke lokasi DRC akan dilakukan secara manual.

b. *Warm DRC*

Warm DRC akan menyediakan komputer dengan segala komponennya, aplikasi, link komunikasi, serta backup data yang paling *update*, dimana sistem tidak otomatis berpindah tetapi masih terdapat proses manual meskipun dilakukan seminimal mungkin.

c. *Hot DRC*

Hot DRC ini mengatur secepat mungkin operasional bisnis, system dengan aplikasi, link komunikasi yang sama sudah dipasang dan sudah tersedia di lokasi DRC, data secara *continue* dibackup menggunakan koneksi *realtime* antara *data center* dan lokasi DRC, dan operasional bisnis akan berjalan pada saat itu juga, tanpa harus mematikan sistem di *data center* yang sedang terganggu.

Membangun DRC tentu saja memerlukan dana yang tidak sedikit, tetapi antisipasi terkait *backup* dan pengamanan data di Kabupaten Rembang perlu dilakukan minimal model *cold DRC*. Berikut beberapa faktor yang penting untuk dipertimbangkan dalam memilih DRC Site:

a. *Tier Data Center* (Peringkat Data Center)

Tingkatan data center atau *tier data center* dibagi dari Tier 1 dengan rasio dapat di akses 99.67% selama setahun, Tier 2 dengan ketersediaan 99.74%, data center tier 3 yang

memiliki semua atribut pada tier 1 dan 2 disamping beberapa jalur distribusi listrik yang memiliki lebih dari 1 sumber sehingga dapat diakses selama 99.98% dalam satu tahun, dan tier 4 dengan ketersediaan 99.99% selama setahun. Dalam membuat keputusan untuk memilih DRC Site, harus ditentukan sesuai kebutuhan berbagai aplikasi dan tingkat rasio akses tersebut.

b. Jarak dari Data Center Utama

Faktor lainnya dalam memilih *recovery data center* adalah jarak antara *data center* utama dengan DRC Site. Ini sangat penting, karena akan mempengaruhi keamanan perangkat dan data penting, pilihlah lokasi yang berjarak antara 25km sampai 100km agar *network legacy* tidak terlalu tinggi, sehingga *zero data loss* dapat di capai saat proses *backup* dan *restore*. Jika terlalu dekat dengan *data center* maka *backup* data lebih rentan terhadap ancaman karena berada dilokasi dengan radius yang dapat terkena dampak bencana, sehingga sangatlah tidak efektif jika kantor berada di Rembang lantas DRC site juga di Rembang.

c. Zona Seismik

Zona seismik adalah suatu wilayah dimana aktivitas seismik terjadi secara konstan. Setiap negara telah menandai daerah mana saja yang masuk dalam zona seismik. Dalam sudut pandang memilih *disaster recovery center*, sangat penting untuk memastikan *data center* utama dan DRC site berada di luar wilayah seismik sehingga dapat meminimalisir kerusakan perangkat atau gangguan jaringan akibat kegiatan seismik.

d. Kondisi Lingkungan Sekitar

Faktor berikutnya untuk dipertimbangkan dalam memilih *disaster recover center* adalah dengan melihat kondisi sekitar lingkungan, seperti cuaca, bahaya lingkungan, dan

sebagainya. Selain itu juga wajib perhatikan struktur bangunan gedung *data center* dan bahan material yang dipakai, seperti apakah tahan terhadap gempa sekian skala *richter* dan menggunakan semen tahan api atau tidak, karena sebuah *data center* untuk *disaster recovery* seharusnya memang dirancang khusus untuk menghadapi bencana.

e. Ketersediaan Konektivitas Multi Operator

Saat terjadi bencana seperti kegagalan sistem ataupun bencana alam di *data center* internal, sarana komunikasi sangat penting untuk berinteraksi baik melalui suara maupun melalui data (*internet*). Oleh karena itu dalam memilih *disaster recovery center* harus dipertimbangkan ketersediaan konektivitas yang bersumber tidak hanya dari 1 operator saja.

f. Aksesibilitas Data Center

Faktor berikutnya adalah aksesibilitas ke situs DRC Site. Ini akan menjadi sangat penting ketika bencana terjadi dan operasional harus beralih sementara ke situs DRC. Jika situs tersebut diakses, operasi dapat dilanjutkan lebih cepat. Akses menuju lokasi DRC *site* pun dapat menjadi faktor penting dalam hal aksesibilitas pada kondisi darurat jika termasuk akan digunakan sebagai BCP *Office* (kantor sementara).

g. Ketersediaan Kapasitas dan Skalabilitas

Dalam memilih *disaster recovery center* harus pertimbangkan rencana kebutuhan di masa depan, oleh karena itu jika sebuah fasilitas *data center* yang akan diketahui memiliki ruangan dan fasilitas yang masih memungkinkan untuk menempatkan perangkat IT maka pilihlah *data center* tersebut.

h. Perbandingan Biaya

Banyak institusi yang akan membangun DRC *Site* sendiri di lokasi tertentu, namun ini akan sangat menguras biaya, sedangkan jika sewa ruangan di *data center* yang memenuhi

syarat sebagai *disaster recovery center* maka jauh lebih hemat.

6. *Command Center*

Command Center menjadi bagian tak terpisahkan dalam implementasi *Smart City*. Melalui *Command Center*, pimpinan dapat memantau seluruh yang ada di Kabupaten Rembang dengan baik. *Command Center* atau ruang pemantau kota berfungsi mengontrol data internal, selain itu, dalam *Command Center* terdapat banyak aplikasi yang bisa memonitor langsung keadaan kota. Misalnya soal CCTV yang merekam keadaan lalu lintas sehingga pelanggaran akan terdeteksi langsung dan CCTV di kantor pelayanan publik untuk memantau aktivitas pelayanan publik. Kabupaten Rembang telah memiliki fasilitas *command center*, namun sayangnya *command center* dibuat di ruang rapat bupati sehingga tidak bisa difungsikan sebagaimana mestinya dan hanya dapat difungsikan sebagai ruang rapat dan ruang persentasi/paparan.



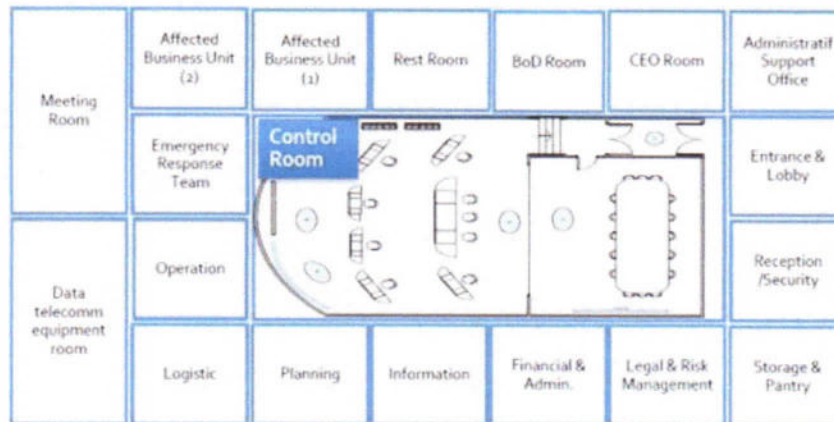
Gambar IV.6 Kondisi Eksisting *Command Center* Kab.Rembang

Command Center semestinya memiliki dua fungsi utama, yaitu untuk menyempurnakan pelayanan publik ke luar, dan untuk mempermudah pelayanan ke dalam, yakni dalam hal manajemen pengambilan keputusan (*decision support system*). Untuk pelayanan publik, *command center* memiliki fasilitas untuk pemantauan kondisi kota melalui CCTV dan layanan aplikasi pengaduan masyarakat. Adapun sebagai *decision support system*, *Command Center* menyediakan berbagai macam

informasi yang dihimpun dari beragam aplikasi yang dimiliki oleh Kabupaten Rembang. *Command Center* menyediakan laporan terkait permasalahan di Kabupaten sebagai bahan instruksi pimpinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang. Laporan tersebut dibuat secara rutin, berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai aplikasi/system informasi maupun media sosial lainnya. *Command center* juga merupakan salah satu kunci penting dalam upaya Pemerintah Kabupaten Rembang untuk mewujudkan Rembang *Smart City*.

Command Center bisa dilengkapi dan intergrasikan dengan berbagai macam perangkat, sistem dan teknologi, antara lain:

- a. *Large Format Display, Video Wall* dengan *Video Controller*.
- b. *CCTV / Video Surveillance (SD Analog CCTV, High Definition HD-CCTV, atau IP CCTV / IP Camera / Network Video Surveillance)*.
- c. *Physical Security Information Management, Biometric / RFID Network Access Control System*.
- d. *Intrusion Alarm System, Emergency Respond, Emergency Exit and Evacuation System*.
- e. *Unified Communications (UC), IP Telephony, Teleconference, Video Conference, Real-time Collaboration Platform, dan lainnya*.



Gambar IV.7 Contoh Lay Out Command Center

Command Centre biasanya dibangun di lokasi yang mempunyai resiko bencana alam dan *security attack* yang rendah dengan pengaturan tata letak yang memungkinkan bagi tim untuk mengadakan rapat, berkomunikasi, bekerja, dan tinggal di tempat tersebut dalam waktu beberapa jam hingga beberapa hari atau lebih.

4.3. Rencana Pengembangan Perangkat Lunak Smart City

1. Standar Arsitektur

a. Penyimpanan Data

Data seluruh sistem harus disimpan pada *data center* secara terpusat untuk kemudahan integrasi dan pengelolaan data. Pengecualian dapat diberikan kepada sistem-sistem khusus dengan karakter membutuhkan beban akses dan *availability* tinggi namun penggunaanya terpusat di satu lokasi, seperti Rumah Sakit dan Puskesmas. Khusus untuk sistem seperti ini, harus disediakan mekanisme sinkronisasi data dengan *data center*.

b. Akses & Keamanan Data

Akses dan pertukaran data dilakukan melalui API (*application programming interface*) yang disediakan sebagai bagian dari infrastruktur *data center*. Komunikasi data harus dibangun dan memperhatikan prinsip-prinsip keamanan data dan jaringan baik dari sisi *Confidentiality*, *Integrity*, *Availability* dan *Authenticity*. Setiap komunikasi sistem melalui

API harus dipastikan menggunakan *protocol HTTPS*.

c. *Clustering Data Base*

Clustering data base dilakukan dengan pembagian fungsi sebagai berikut:

- 1) *Data base master* digunakan untuk transaksional
- 2) *Data base slave* hanya digunakan untuk *warehouse/analysis/query*
- 3) Pemisahan data transaksional dan data untuk *warehouse* berguna untuk membedakan letak data yang akan disimpan di *storage*. Pada data transaksional dapat diletakkan pada *storage* berkecepatan tinggi, sedangkan untuk *warehouse* bisa menggunakan spesifikasi lebih rendah.
- 4) *Data base* bukanlah file biasa yang mudah dicopy, disnapshot dan dibackup. Proses yang biasa dilakukan adalah *dump*, replikasi dan *restore*.
- 5) Opsi *high availability* untuk *data base server* menjadi salah satu syarat untuk pengembangan dan pemilihan produk *data base* ke depannya.
- 6) Untuk keamanan dan juga untuk meningkatkan *availability/ketersediaan* data maka perlu dilakukan *backup* rutin. *Tape backup* data selain disimpan dilokasi *on-site*, juga harus disimpan di lokasi *off-site*. Penyimpanan, penggunaan dan kebutuhan media *tape* harus memperhatikan masa retensi.

d. *Platform Perangkat Lunak*

Platform *front end* perangkat lunak *Smart City* Kabupaten Rembang disediakan dengan teknologi *web-based* dan atau *mobile based*. Untuk *mobile based* dikembangkan menggunakan *code native* masing-masing *platform* baik android maupun *IOS*, bukan *hybrid apps* maupun *iframe apps mobile*. Hal ini untuk mendapatkan performa terbaik dan kecepatan akses aplikasi mengingat aplikasi melayani seluruh warga Rembang.

Serta untuk aplikasi dengan teknologi *web-based* nantinya menggunakan standar pengembangan *micro service* dan *web-based compile on server*, hal ini penting untuk garda pengamanan aplikasi yang akan dikembangkan. Penggunaan *platform* berbasis desktop harus ditinggalkan untuk memudahkan kemungkinan pembaharuan, perawatan dan meminimalisir biaya, kecuali untuk kasus-kasus khusus dimana penggunaan kedua *platform* tersebut tidak dimungkinkan.

2. Klasifikasi Perangkat Lunak *Smart City*

Pengembangan aplikasi atau sistem informasi dan perangkat lunak pendukung *smart city* sesuai dengan kebutuhan daerah, meliputi: integrasi kinerja pembangunan daerah, meningkatkan branding potensi daerah, dan layanan publik dalam rangka peningkatan ekonomi daerah dan pembangunan berkelanjutan dengan prinsip inovatif, berkarakter dan produktif pembembangan daerah.

Inovasi dengan memikirkan kembali cara mengelola kabupaten dan terus berpikir melakukan hal yang lebih baik dan menjadi lebih cerdas (*smarter*) melalui perangkat lunak dan keras. *Platform* yang dibuat harus dapat berkembang dan berubah, baik untuk komponen inti maupun antar mukanya, sehingga keputusan-keputusan yang diambil pimpinan dapat bersifat lebih adaptif terhadap berbagai masalah aktual dimasyarakat. *Platform* layanan cerdas menjadi solusi layanan (*collaboration services*) yang menghubungkan antara manusia, proses dan teknologi. *Platform* layanan cerdas dibangun dengan menerapkan:

- a. *Business Process*, yaitu proses kerja dan prosedur layanan yang jelas, serta mampu memberikan informasi kejadian secara *realtime* termasuk eskalasinya.
- b. *Presentation Service*, yaitu visualisasi dan jembatan antar aplikasi layanan.
- c. *Decision Service*, yaitu layanan yang mampu memberikan

prediksi dan pilihan solusi atau suatu masalah kota.

- d. *Information Service* adalah layanan yang memberikan informasi publik kepada masyarakat umum.
- e. *Device Integration Service* adalah layanan yang memberikan jembatan antar mesin, dapat berupa *web service* atau *protocol standar*.
- f. *Dashboard Service* adalah layanan yang memberikan visualisasi informasi dalam bentuk satu antar muka yang mudah dipahami untuk dapat segera digunakan sebagai informasi yang harus segera ditindaklanjuti.

4.4. Tahapan Pengembangan

1. Prioritas Pengembangan

Prioritas pengembangan perangkat lunak *Smart City* disusun dengan memperhatikan setidaknya dua faktor yakni pola ketergantungan antar sistem dan prioritas pengembangan yang merujuk kepada Kawasan Strategis Kabupaten.

2. Pola Ketergantungan Antar Sistem

Perangkat lunak *Smart City* tidak berdiri sendiri-sendiri. Terdapat perangkat lunak yang memiliki ketergantungan terhadap keberadaan infrastruktur tertentu dan perangkat lunak lain, terutama dari sisi ketersediaan data. Ketergantungan mutlak menggambarkan bahwa sistem yang menjadi pendahulu (*predecessor*, pangkal panah) mutlak harus sudah ada sebelum sistem yang membutuhkan (*successor*, ujung panah).

Dalam implementasi *smart city* tidak dapat dipungkiri akan memerlukan banyak aplikasi karena kehadiran aplikasi telah membantu produktivitas para penggunanya. Namun, kehadiran aplikasi yang semakin banyak menjadikan kesulitan bagi penggunanya karena permasalahan antara lain:

- a. proses *login* dan autentikasi semakin rumit
- b. minim integrasi system

Untuk mengatasi permasalahan karena banyaknya aplikasi

dapat dilakukan dengan:

a. Sistem *Single Sign-On* (SSO)

Para pengguna hanya perlu sekali melakukan *login* untuk dapat mengakses beberapa aplikasi. Dengan demikian, para pengguna tidak perlu lagi *login* di masing-masing aplikasi. SSO memiliki dua arti, yakni *Single Sign-On*, di mana para pengguna dapat mengakses semua aplikasi yang telah diatur oleh sistem dengan sekali *login*, ataupun *Single Sign-Out*, yang berarti *logout* dari satu aplikasi, maka semua aplikasi yang telah diatur di sistem akan *logout* pula secara otomatis. Contoh SSO yang paling lazim adalah Google Account, kita cukup membuat sebuah akun GMail (mail.google.com), dan bisa kita gunakan untuk aplikasi lainnya seperti Google+ (plus.google.com), maupun YouTube (youtube.com). Hanya perlu *login* ke salah satu aplikasi tadi, misalnya GMail, kemudian kita bisa akses aplikasi lainnya tanpa perlu *login* lagi, itulah *Single Sign-On*.

Manfaat Sistem *Single Sign-On*

- 1) Dengan sistem *Single Sign-On*, para pengguna tidak perlu mengingat banyak *username* dan *password*. Mereka hanya butuh mengingat satu kredensial untuk melakukan sekali proses autentikasi. Setelahnya, mereka akan mendapatkan izin akses terhadap semua layanan aplikasi yang tersedia di dalam jaringan.
- 2) Pemrosesan data akan dipermudah dengan sistem *Single Sign-On* karena pemrosesan data pengguna (penambahan, pengurangan, perubahan) hanya dilakukan sekali pada server data base *backend*-nya, tidak pada masing-masing aplikasi yang ada. Maka dari itu, penggunaan sistem *Single Sign-On* memastikan peningkatkan efisiensi waktu dan kepraktisan dalam memproses data.
- 3) Tidak perlu membuat data pengguna yang sama di setiap aplikasi. Para pengguna hanya perlu menginput data

mereka sekali saja ke dalam server data base *backend*. Hal ini dapat terjadi karena semua aplikasi yang ada dalam jaringan dapat terhubung langsung dengan server data base *backend* yang ada.

Pada dasarnya SSO adalah akses ke beberapa *software* yang terpisah dan berdiri sendiri, tetapi dimiliki oleh satu pengguna yang sama.

b. Satu Data untuk integrasi system (*interoperability*)

Di kondisi ideal, suatu organisasi akan terhubung dengan organisasi lainnya. Mereka menciptakan jaringan lintas wilayah atas data yang dimiliki. Data itu bisa digunakan untuk kepentingan yang beragam, misalnya memprediksi tren tertentu. Tanpa adanya interoperabilitas, transfer yang ingin dilakukan akan sangat menguras tenaga dan waktu organisasi. Melalui teknologi terbaru, pengiriman digital mampu bekerja cepat dan akurat dalam mengumpulkan data publik yang langsung dapat diinterpretasikan untuk berbagai tujuan. Bagaimana data ditransfer dan ditangkap antara teknologi dan sistem dan bagaimana digunakan oleh pengambil keputusan.

Integrasi system bisa dilakukan dengan menggunakan penataan satu data atau dengan system Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP).

1) Satu Data

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian pelaksanaan Satu Data, maka sangat dibutuhkan pemahaman yang menyeluruh dan kesepakatan komitmen dari pihak terkait untuk dapat melaksanakan peran statistik di masing-masing bidang, seperti: statistik dasar, statistik sektoral, maupun statistik khusus. Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program Satu Data pada setiap unit kerja. Pemahaman terkait satu data juga harus diimbangi pula dengan mengapa dan bagaimana

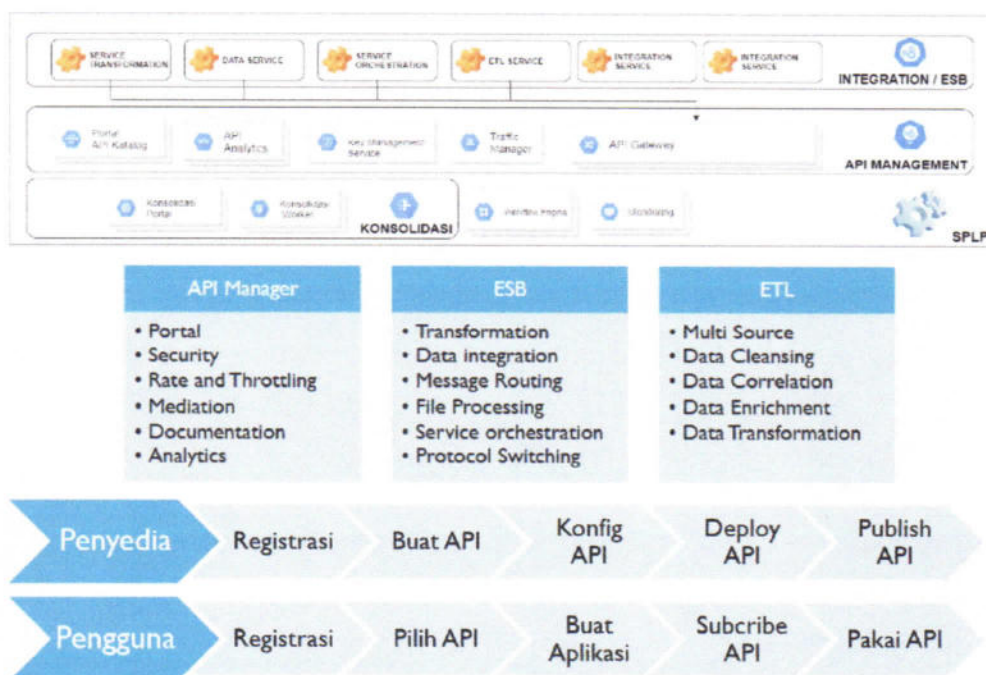
pemanfaatan satu data, agar dapat dipergunakan secara optimal untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan.

Data yang tersebar pada instansi baik di pusat maupun daerah dengan tidak saling terhubung sehingga mengakibatkan ketidak akuratan data, ketidak lengkapan data, kelambatan penyampaian yang berujung pada pengambilan keputusan yang tidak tepat.

Dengan satu data diharapkan akses terhadap data-data tersebut tidak lagi bersifat silo (terpisah) sehingga tidak terjadi duplikasi dan perbedaan pada elemen data sejenis.

2) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SPLPD adalah suatu sistem yang dikembangkan dengan tujuan untuk memudahkan integrasi layanan antar sistem pemerintahan berbasis elektronik. Arsitektur dan alur SPLP sebagaimana Gambar IV.8 berikut:



Gambatr IV.8 Arsitektur dan Alur SPLP

3) Sistem Integrasi Gerbang Pembayaran

Dalam *smart city* juga perlu memperhatikan perancangan untuk integrasi dengan PJSP (Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran) baik *integrator* maupun *agregator* terkait layanan kemudahan pemungutan pendapatan daerah seperti PBB, BPHTB dll.

Proses integrasi ini menjadi hal penting akan terselenggaranya *Smart City* dengan *akuntable* dan menyediakan layanan pembayaran yang mudah bagi masyarakat Rembang.

3. Rencana Penguatan Literasi *Smart City*

Literasi digital merupakan ketertarikan, sikap, dan kemampuan individu menggunakan teknologi digital dan alat komunikasi untuk mengakses, mengelola, mengintegrasikan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi, membangun pengetahuan baru, membuat, dan berkomunikasi dengan orang lain agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat.

Literasi digital merupakan kemampuan dasar secara teknis untuk menjalankan komputer serta internet, yang ditambah dengan memahami serta mampu berpikir kritis dan juga melakukan evaluasi pada media digital dan bisa merancang konten komunikasi.

Literasi ini sangat diperlukan dalam segala lini kehidupan manusia karena kemampuan literasi dapat menjadi kunci manusia untuk berproses menjadi manusia yang lebih berpengetahuan dan berperadaban dengan berbasis pada karakter kebangsaan, religious dan budaya. Penguatan literasi *smart city* sangat dibutuhkan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dan aparatur tentang pentingnya implementasi *smart city* agar diketahui tatacara penerapan/ penggunaan, menganalisis manfaat dan bersikap/berkomunikasi dengan orang lain di dunia digital.

Selain literasi melalui Website <http://rembangkab.go.id> , penguatan literasi *Smart City* dilaksanakan paralel dengan penguatan komponen *Smart City* lainnya, seperti penguatan infrastruktur dan suprastruktur. Penguatan literasi dilaksanakan berkesinambungan melalui bimtek, *focus group discussion*, sosialisasi, dan seminar tentang *Smart City*. Bimtek, *focus group discussion*, sosialisasi, dan seminar dilakukan dengan melibatkan *stakeholder* yang terkait.

Penguatan literasi masyarakat terhadap *Smart City* dapat dilakukan melalui:

- a. Sosialisasi melalui Kelompok Masyarakat, forum komunikasi kelompok sosial maupun jaringan informasi lain yang sudah ada.
 - 1) Membuat *running text* yang dapat menyambungkan *website* yang satu dengan *website* lainnya, pada halaman *website* rembangkab.go.id dan *website* setiap perangkat daerah.
 - 2) Menyediakan portal *directory*, semacam *playstore*.
 - 3) Memasang iklan aplikasi *smart city* lainnya pada setiap

aplikasi yang sedang dipakai masyarakat.

- b. Melakukan kampanye melalui publikasi media massa *offline* dan *online*, serta media sosial tentang gerakan pengembangan *smart city* untuk rencana program dan tahapan implementasinya.
- c. Membangun sinergi antara akademisi, bisnis, pemerintah, media dan komunitas melalui forum *Smart City*.
- d. Membuat *platform* untuk gerakan *literacy* digital dengan mengusung beberapa tema yang berkembang dan dibutuhkan oleh semua lapisan masyarakat dan dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat.

Selanjutnya dilakukan bimtek penggunaan aplikasi, pemeliharaan aplikasi, dan pengamanan aplikasi. Bimtek, *focus group discussion*, sosialisasi, dan seminar tentang perkembangan teknologi, *trouble shooting* sistem, etika profesi, etika penyebaran dan penggunaan informasi. Untuk itu Dinas KOMINFO Kabupaten Rembang memastikan adanya dokumentasi seperti *manual book*, SOP, dan buku petunjuk.

BAB V
PETA JALAN PEMBANGUNAN REMBANG SMART CITY

Roadmap atau peta jalan pembangunan *Smart City* Kabupaten Rembang dimulai dari dimensi utama yang menjadi fokus dalam pembangunan *Smart City*. Pembangunan *Smart City* Kabupaten Rembang dimulai berdasarkan *roadmap* jangka pendek (1 tahun), jangka menengah (5 tahun), dan jangka panjang (10 tahun) seperti pada Gambar V.1 di bawah ini.



Gambar V.1 Roadmap Jangka Pendek, Jangka Menengah, dan Jangka Panjang

5.1. Rencana Program Pembangunan Jangka Pendek dan Quick Win

Dalam *roadmap* implementasi program pembangunan *Smart City*, dimensi yang menjadi focus utama untuk dalam pembangunan *Smart City* Kabupaten Rembang dan akan dimunculkan dalam program *quick win* adalah dimensi *Smart Governance* yang didukung dengan *Smart Branding*. Melihat kondisi Kabupaten Rembang, terdapat beberapa potensi yang dapat dikembangkan agar Kabupaten Rembang memiliki *positioning* yang kuat di masyarakat, diantaranya mengembangkan *e-government* serta wajah kota dan pariwisata serta peluang bisnis bagi investor di Rembang. Dari potensi inilah kemudian disepakati *quick win* program pembangunan *Smart City* bertumpu pada dimensi *Smart Governance* dan *Smart Branding*.

1. Rencana Program Pembangunan Jangka Pendek dan *Quick win Smart Governance*

Roadmap pembangunan program jangka pendek dan *quick win smart governance* diuraikan pada Tabel V.1 di bawah ini.

Tabel V.1
Rencana Program Pembangunan Jangka Pendek dan *Quick Win Smart Governance*

Indikator <i>Smart City</i>	Sasaran <i>Smart City</i>	Program	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran (Rp.)	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Jangka Pendek	
								2021	2022
SMART GOVERNANCE									
Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi.	Program Pencatatan Sipil	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting berbasis <i>web-base</i> , android dan <i>IOS</i>	% penerbitan akta kelahiran, % penerbitan akta kematian, % Kepemilikan Penetapan Status Keluarga	200.000.000	APBD Kab.	DISDUKCAPIL/DI SKOMINFO	√	√
			Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil berbasis <i>web-base</i> , android dan <i>IOS</i>	% penerbitan akta kelahiran, % penerbitan akta kematian, % Kepemilikan Penetapan Status Keluarga	850.000.000	APBN/ APBD Kab.	DISDUKCAPIL/DI SKOMINFO	√	√
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase Ketersediaan data kependudukan yang dimutakhirkan	850.000.000	APBN/ APBD Kab.	DISDUKCAPIL/DI SKOMINFO	√	√

			berbasis <i>web-base</i> , android dan <i>IOS</i>						
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase profil data kependudukan	100.000.000	APBD Kab.	DISDUKCAPIL	√	√
Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perijinan serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi		Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal	% penyelesaian pengaduan permasalahan perijinan dan non perijinan	100.000.000	APBD	DPMPTSP NAKER	√	√
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik berbasis <i>web-base</i> , android dan <i>IOS</i>	% penyelesaian permohonan perijinan dan non perijinan sesuai SOP	850.000.000	APBN/ APBD	DPMPTSP NAKER/ DISKOMINFO	√	√
		Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase implementasi Riset dan Pengembangan yang dimanfaatkan untuk perencanaan	50.000.000	APBD Kab.	KESBANGPOL	√	√
Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengembangan Kompetensi Teknis	% ASN yang mengikuti diklat sesuai kebutuhan	75.000.000	APBD Kab.	DISDUKCAPIL	√	√

Meningkatkan kualitas sarpras layanan teknologi informasi kesehatan masyarakat.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	% Capaian layanan penunjang sesuai standar akreditasi & SPM pelayanan medik dan keperawatan	500.000.000	APBD Kab.	DINKES	√	√
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi berbasis <i>web-base</i> , android dan <i>IOS</i>	% Pemenuhan layanan informasi dan pemanfaatan teknologi informasi	1.500.000.000	APBN/ APBD	DINKES/ DISKOMINFO	√	√
Meningkatkan kualitas layanan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi.	Program Informasi & Komunikasi Publik	Pelayanan Informasi Publik	% cakupan pelayanan informasi publik	200.000.000	APBD Kab.	DINKES	√	√
	Program Aplikasi Informatika	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indek teknologi, informasi dan komunikasi	125.000.000	APBD Kab.	DISKOMINFO	√	√
	Program Aplikasi Informatika	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Indeks layanan publik berbasis elektronik	200.000.000	APBD Kab.	DISKOMINFO	√	√
	Program Aplikasi Informatika	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Indeks layanan publik berbasis elektronik	200.000.000	APBD Kab.	DISKOMINFO	√	√
	Program Aplikasi Informatika	Layanan Hubungan Media	Indeks layanan publik berbasis elektronik	200.000.000	APBD Kab.	DISKOMINFO	√	√

		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	% Publikasi data statistik sektoral	150.000.000	APBD Kab.	DISKOMINFO	√	√
		Program Aplikasi Informatika	Penggunaan <i>Single Sign On</i> (SSO)	Indeks layanan publik berbasis elektronik	1.500.000.000	APBN/APBD	DISKOMINFO	√	√
	Meningkatkan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik	Program Perekonomian dan Pembangunan	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	50.000.000	APBD Kab.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	√	√
	Meningkatkan/mengembangkan aplikasi data base ketenagakerjaan.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	% capaian data base tenaga kerja yang dikelola dengan baik	50.000.000	APBD	DPMPSTP NAKER	√	√
	Meningkatkan kualitas pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi	% laporan pelayanan perizinan dan non perizinan yang dikelola dengan baik	50.000.000	APBD	DPMPSTP NAKER	√	√
	Meningkatkan kualitas pengelolaan informasi Kependudukan.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan berbasis <i>web-base</i> , android dan <i>IOS</i>	% Ketersediaan data kependudukan yang dimutakhirkan	930.000.000	APBN/APBD Kab.	DISDUKCAPIL/DI NKOMINFO	√	√
Manajemen Birokrasi yang Efisien	Mengembangkan teknologi informasi untuk tata kelola birokrasi yang transparan dan bertanggungjawab	Program Aplikasi Informatika	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat & Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah	Indeks layanan publik berbasis elektronik	150.000.000	APBD Kab.	Dinkominfo	√	√
	Mengembangkan aplikasi yang	Program Aplikasi	Sinkronisasi Pengelolaan	Indeks Perencanaan	200.000.000	APBD Kab.	Dinkominfo	√	√

terintegrasi untuk semua OPD	Informatika	Rencana Induk & Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Strategis					
	Program Aplikasi Informatika	Server pendukung <i>smart city</i>	Indeks layanan publik berbasis elektronik	450.000.000	APBD Kab.	Dinkominfo	√	√
	Program Aplikasi Informatika	Peningkatan data center	Indeks layanan publik berbasis elektronik	100.000.000	APBD Kab.	Dinkominfo	√	√
	Program Aplikasi Informatika	Pemeliharaan command center	Indeks layanan publik berbasis elektronik	100.000.000	APBD Kab.	Dinkominfo	√	√
	Program Aplikasi Informatika	Pembuatan mini command center	Indeks layanan publik berbasis elektronik	150.000.000	APBD Kab.	Dinkominfo	√	√
	Program Aplikasi Informatika	Pemeliharaan jaringan FO	Indek teknologi, informasi dan komunikasi	200.000.000	APBD Kab.	Dinkominfo	√	√
	Program Aplikasi Informatika	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indek layanan administrasi pemerintahann berbasis elektronik	200.000.000	APBD Kab.	Dinkominfo	√	√
	Program Aplikasi Informatika	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/ Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Indek layanan administrasi pemerintahann berbasis elektronik	800.000.000	APBD Kab.	Dinkominfo	√	√
	Program Aplikasi Informatika	pengembangan aplikasi pendukung smart city	Indek penyelenggaraan	500.000.000	APBD Kab.	Dinkominfo	√	√
	Meningkatkan kualitas sistem	Program Aplikasi	Koordinasi dan Sinkronisasi	% Cakupan pengamanan	100.000.000	APBD Kab.	Dinkominfo	√

keamanan aplikasi Pemerintah Kabupaten.	Informatika	Sistem Keamanan Informasi	informasi						
Mengupgrade sistem dan perangkat TIK	Program Aplikasi Informatika	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah berbasis <i>web-base</i> , android dan <i>IOS</i>	Indek teknologi, informasi dan komunikasi	2.000.000.000	APBN/ APBD Kab.	Dinkominfo	√	√	
Meningkatkan keamanan informasi.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	% Cakupan pengamanan informasi	250.000.000	APBD Kab.	Dinkominfo	√	√	
Mengelola media informasi dan komunikasi publik	Program Aplikasi Informatika	<i>Single portal</i>	Indek penyelenggaraan	50.000.000	APBD Kab.	Dinkominfo	√	√	
Pendampingan OPD dan Desa dalam sistem pengawasan daerah.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan tata kelola pemerintah baik	1.200.000.000	APBD Kab.	Inspektorat	√	√	
Meningkatkan kapasitas pengelola pasar sesuai peraturan perundangan.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	% cakupan pasar sesuai peraturan perundang-undangan	150.000.000	APBD Kab.	Dinindagkop UMKM	√	√	
Meningkatkan kualitas usaha industri perempuan (IR).	Program Pengarusutamaan Gender dan pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan pada Bidang Ekonomi	Persentase industri perempuan (IR) yang mendapatkan pendampingan menjadi pelaku	100.000.000	APBD Kab.	DinsosPPKB	√	√	

	Meningkatkan Aksesibilitas Data dan Informasi Kepegawaian	Program kepegawaian daerah	Pengelolaan Data dan Informasi ASN	usaha % tingkat ketersediaan data dan informasi kepegawaian	50.000.000	APBD Kab.	Badan Kepegawaian Daerah (BKD)	√	√
Efisiensi Kebijakan Publik	Mengembangkan sistem informasi kebijakan Publik yang interaktif, informatif, komunikatif & partisipatif berbasis IT	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	% cakupan pelayanan informasi publik	175.000.000	APBD Kab.	Dinkominfo	√	√
	Menyusun kebijakan publik yang informatif, komunikatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Administrasi Tata Pemerintahan	% Rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan bidang Kesejahteraan Rakyat	75.000.000	APBD Kab.	Sekretariat Daerah	√	√
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	% Rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan bidang Kesejahteraan Rakyat	25.000.000	APBD Kab.	Sekretariat Daerah	√	√
	Sosialisasi kebijakan dan data statistik berbasis IT	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	% Publikasi data statistik sektoral	100.000.000	APBD Kab.	Dinkominfo	√	√
	Meningkatkan daya saing sektor pertanian.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai	% Sarana pertanian dalam kondisi baik	100.000.000	APBD Kab.	Dintanpan	√	√

			Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi						
	Kebijakan pembangunan <i>Smart city</i> ,	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kelembagaan <i>smart city</i>	% Rumusan Bahan Kebijakan yang menjadi kebijakan bidang Pemerintahan	100.000.000	APBD Kab.	Sekretariat Daerah	√	√

2. Rencana Program Pembangunan Jangka Pendek dan *Quick win Smart Branding*

Roadmap pembangunan program jangka pendek dan *quick win smart branding* diuraikan pada Tabel V.2 di bawah ini.

Tabel V.2

Rencana Program Pembangunan Jangka Pendek dan *Quick Win Smart Branding*

Indikator <i>Smart City</i>	Sasaran <i>Smart City</i>	Program	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran (Rp.)	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Jangka Pendek	
								2021	2022
SMART BRANDING									
Ekosistem Pariwisata	Mengembangkan sistem informasi pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata	Penyediaan data & penyebaran informasi pariwisata kabupaten/kota, baik dalam dan luar negeri berbasis <i>web-base</i> , <i>android</i> & <i>IOS</i>	Pertumbuhan kunjungan wisatawan	450.000.000	APBN/ APBD Kab.	Dinbudpar/ Dinkominfo	√	√
	Mengembangkan seni tradisi.	Program Pengembangan Kebudayaan	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	% seni tradisi yang dikembangkan menjadi daya tarik wisata	200.000.000	APBD Kab.	Dinbudpar	√	√

	Meningkatkan pelestarian cagar budaya.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Pencegahan dan Penanggulangan dari Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan Cagar Budaya	% cagar budaya yang dilestarikan	200.000.000	APBD Kab.	Dinbudpar	√	√
	Menata Bangunan dan Lingkungannya.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Mengembangkan TRP Kartini sebagai <i>public space (tourism & cultural business center)</i>	Persentase Jumlah Fasilitas penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan	200.000.000	APBD Kab.	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	√	√
	Mengembangkan keunikan dan kekhasan potensi pariwisata.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata	Pertumbuhan daya tarik Destinasi Pariwisata yang dikembangkan	500.000.000	APBD Kab.	Dinbudpar	√	√
			Pembuatan city branding ikonik	Pertumbuhan daya tarik Destinasi Pariwisata yang dikembangkan	500.000.000	APBD Kab.	Dinbudpar	√	√
	Mengembangkan kreatifitas dan inovasi event-event pariwisata.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengembangan Daya Tarik Wisata	Pertumbuhan daya tarik Destinasi Pariwisata yang dikembangkan	200.000.000	APBD Kab.	Dinbudpar	√	√
Ekosistem Bisnis Daerah	Mengembangkan usaha mikro.	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Persentase Usaha Mikro yang naik kelas	150.000.000	APBD Kab.	Dinindagkop UMKM	√	√
	Meningkatkan kuantitas produk dalam negeri	Program Penggunaan dan Pemasaran	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk	% produk dalam negeri yang dipasarkan di	450.000.000	APBN/ APBD Kab.	Dinindagkop UMKM/Dinko minfo	√	√

	untuk masuk pasar rakyat dan retail modern.	Produk Dalam Negeri	Dalam Negeri berbasis <i>web-base</i> , android dan <i>IOS</i>	pasar rakyat dan retail modern					
	Meningkatkan/ Mengembangkan pasar sesuai peraturan perundangan.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	% cakupan pasar sesuai peraturan perundang-undangan	2.000.000.000	APBD Kab.	Dinindagkop UMKM	√	√
	Meningkatkan promosi investasi sektor ekonomi strategis melalui teknologi informasi.	Program Promosi Penanaman Modal	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah berbasis <i>web-base</i> , android dan <i>IOS</i>	Pertumbuhan investor	450.000.000	APBN/ APBD Kab.	DPMPPTSPNaker/Dinkominfo	√	√
	Meningkatkan kualitas hubungan industrial dalam mendukung <i>smart city</i> .	Program Hubungan Industrial	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial	% perusahaan yang taat aturan	50.000.000	APBD Kab.	DPMPPTSPNaker	√	√
	Meningkatkan kualitas pemberdayaan & pengembangan UKM agar dapat berdayasaing berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.	Program Pengembangan UMKM	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi berbasis <i>web-base</i> , android dan <i>IOS</i>	Persentase Usaha Mikro yang naik kelas	450.000.000	APBN/ APBD Kab.	Dinindagkop UMKM/Dinkominfo	√	√
Wajah Kota	Meningkatkan kualitas Infrastruktur & Pembuatan RTH.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Persentase Luas RTH Baru/ Terfasilitasi	150.000.000	APBD Kab.	Dinas Lingkungan Hidup	√	√

	Menata fasilitas Bangunan dan Lingkungan (koridor, nodes dan landmark).	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase Jumlah Fasilitas penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan	500.000.000	APBD Kab.	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	√	√
	Meningkatkan kualitas ketentraman dan ketertiban berbasis IT.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum	20.000.000	APBD Kab.	Satpol PP	√	√
	Meningkatkan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Cakupan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum	20.000.000	APBD Kab.	Satpol PP	√	√

5.2. Rencana Program Pembangunan Jangka Menengah

Roadmap atau peta jalan pembangunan *Smart City* Kabupaten Rembang jangka menengah diuraikan berdasarkan 6 (enam) dimensi *Smart City*.

1. Rencana Program Pembangunan Jangka Menengah *Smart Governance*

Roadmap pembangunan program jangka menengah *smart governance* diuraikan pada Tabel V.3 di bawah ini.

Tabel V.3

Rencana Program Pembangunan Jangka Menengah *Smart Governance*

Indikator <i>Smart City</i>	Sasaran <i>Smart City</i>	Program	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran (Rp.)	Sumber Pembia- yaan	Pelaksana	Jangka Menengah				
								2021	2022	2023	2024	2025
SMART GOVERNANCE												
Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi.	Program Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk berbasis <i>web-base</i> , android dan <i>IOS</i>	% kepemilikan KTP-El, % Kepemilikan KK, % Kepemilikan KIA, % Kepemilikan Dokumen Pindah Datang	450.000.000	APBD Kab./ APBN	DISDUKCA PIL/ DINKOMINFO			√	√	√
	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perijinan serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Program Pelayanan Penanaman Modal	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan berbasis <i>web-base</i> , android dan <i>IOS</i>	% penyelesaian penanganan pengaduan permasalahan perijinan dan non perijinan	450.000.000	APBD Kab./ APBN	DPMPTSP Naker / DINKOMINFO			√	√	√

Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pembinaan, Pengkoordinasian, Fasilitasi, Pemanfaatan, Evaluasi, & Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, & Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	% ASN yang mengikuti diklat sesuai kebutuhan	250.000.000	APBD Kab.	BKD			√	√	√
Meningkatkan kualitas sarpras layanan teknologi informasi kesehatan masyarakat.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengadaan Alat/ Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	% Pemenuhan layanan informasi dan pemanfaatan teknologi informasi	300.000.000	APBD Kab.	Dinas Kesehatan		√	√	√	√
		Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan berbasis <i>web-base</i> , android dan <i>IOS</i>	% Pemenuhan layanan informasi dan pemanfaatan teknologi informasi	450.000.000	APBD Kab./ APBN	Dinas Kesehatan/ Dinkominfo		√	√	√	√
Meningkatkan kualitas layanan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi.	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	% cakupan pelayanan informasi publik	450.000.000	APBD Kab./ APBN	Dinas Kesehatan/ Dinkominfo		√	√	√	√

	Meningkatkan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik	Program Perekonomian dan Pembangunan	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	50.000.000	APBD Kab	Sekda		√	√	√	√
	Meningkatkan/mengembangkan aplikasi data base ketenagakerjaan.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja berbasis <i>web-base</i> , android dan <i>IOS</i>	% Calon Pencari Kerja yang Ditempatkan	450.000.000	APBD Kab./ APBN	DPMPTSP Naker / DINKOMINFO		√	√	√	√
	Meningkatkan kualitas pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengolahan, Penyajian & Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik berbasis <i>web-base</i> , android dan <i>IOS</i>	% laporan pelayanan perijinan dan non perijinan yang dikelola dengan baik	450.000.000	APBD Kab./ APBN	DPMPTSP Naker / DINKOMINFO		√	√	√	√
	Meningkatkan kualitas pengelolaan Informasi Kependudukan.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	% Ketersediaan data kependudukan yang dimutakhirkan	50.000.000	APBD Kab.	DISDUKCAPIL		√	√	√	√
Manajemen Birokrasi yang Efisien	Mengembangkan teknologi informasi untuk tata kelola birokrasi yang transparan dan bertanggungjawab	Program Aplikasi Informatika	Penatalaksanaan dan Pengawasan <i>e-government</i> dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berbasis web base, android dan <i>IOS</i>	Indeks Kebijakan Internal Tata Kelola	900.000.000	APBN/ APBD Kab.	Dinkominfo		√	√	√	√

	Pendampingan OPD & Desa dalam sistem pengawasan daerah.	Program Pembinaan & Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan tata kelola pemerintah baik	100.000.000	APBD Kab.	Dinperma des		√	√	√	√
	Meningkatkan kapasitas pengelola pasar sesuai peraturan perundangan.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	% cakupan pasar sesuai peraturan perundangan	150.000.000	APBD Kab.	Dinindagkop UKM		√	√	√	√
	Meningkatkan kualitas usaha industri perempuan (IR).	Program Pengarusutamaan Gender dan pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan pada Bidang Ekonomi	Persentase industri perempuan (IR) yang mendapatkan pendampingan menjadi pelaku usaha	150.000.000	APBD Kab.	DinsosPPKB		√	√	√	√
	Meningkatkan Aksesibilitas Data dan Informasi Kepegawaian	Program kepegawaian daerah	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian berbasis <i>web-base</i> , <i>android</i> & <i>IOS</i>	% tingkat ketersediaan data dan informasi kepegawaian	450.000.000	APBD Kab./ APNBN	BKD/ Diskominfo		√	√	√	√
Efisiensi Kebijakan Publik	Mengembangkan sistem informasi kebijakan Publik yang interaktif, informatif, komunikatif & partisipatif berbasis IT	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	% cakupan pelayanan informasi publik	100.000.000	APBD Kab.	Diskominfo		√	√	√	√
	Menyusun kebijakan publik yang informatif, komunikatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	% Rumusan Bahan kebijakan yang menjadi kebijakan bidang Kesejahteraan Rakyat	100.000.000	APBD Kab.	Setda		√	√	√	√

2. Rencana Program Pembangunan Jangka Menengah *Smart Branding*

Roadmap pembangunan program jangka menengah *smart branding* diuraikan pada Tabel V.4 di bawah ini.

Tabel V.4

Rencana Program Pembangunan Jangka Menengah *Smart Branding*

Indikator Smart City	Sasaran Smart City	Program	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran (Rp.)	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Jangka Menengah				
								2021	2022	2023	2024	2025
SMART BRANDING												
Ekosistem Pariwisata	Mengembangkan sistem informasi pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan luar Negeri	Pertumbuhan kunjungan wisatawan	250.000.000	APBD Kab.	Dinbudpar		√	√	√	√
	Mengembangkan seni tradisi.	Program Pengembangan Kebudayaan	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	% seni tradisi yang dikembangkan menjadi daya tarik wisata	200.000.000	APBD Kab.	Dinbudpar		√	√	√	√
	Meningkatkan pelestarian cagar budaya.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Pendayagunaan Cagar Budaya	% cagar budaya yang dilestarikan	200.000.000	APBD Kab.	Dinbudpar		√	√	√	√
	Menata Bangunan dan Lingkungannya.	Program Penataan Bangunan dan	Pembangunan TRP Kartini	Persentase Jumlah Fasilitas penyelenggaraan	3.000.000.000	APBD Kab.	Dinbudpar		√	√	√	√

		Lingkungannya		penataan bangunan dan lingkungan								
	Mengembangkan keunikan dan kekhasan potensi pariwisata.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana & Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata	Pertumbuhan daya tarik Destinasi Pariwisata yang dikembangkan	500.000.000	APBD Kab.	Dinbudpar		√	√	√	√
	Mengembangkan kreatifitas dan inovasi event-event pariwisata.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata	Pertumbuhan daya tarik Destinasi Pariwisata yang dikembangkan	200.000.000	APBD Kab.	Dinbudpar		√	√	√	√
Ekosistem Bisnis Daerah	Mengembangkan usaha mikro.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh & Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Pertumbuhan Tenaga Kerja Usaha Mikro	200.000.000	APBD Kab.	Dinindag kop UMKM		√	√	√	√
	Meningkatkan kuantitas produk dalam negeri untuk masuk pasar rakyat dan retail modern.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	% produk dalam negeri yang dipasarkan di pasar rakyat dan retail modern	200.000.000	APBD Kab.	Dinindag kop UMKM		√	√	√	√

	Meningkatkan/ Mengembangkan pasar sesuai peraturan perundangan.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	% cakupan pasar sesuai peraturan perundang- undangan	200.000.000	APBD Kab.	Dinindag kop UMKM		√	√	√	√
	Meningkatkan promosi investasi sektor ekonomi strategis melalui teknologi informasi.	Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah berbasis <i>web-base</i> , android dan <i>IOS</i>	Pertumbuhan investor	450.000.000	APBD Kab./A PBN	DPMPTS PNaker /DISKO MINFO		√	√	√	√
	Meningkatkan kualitas hubungan industrial dalam mendukung <i>smart city</i> .	Program Hubungan Industrial	Koordinasi pelaksanaan kegiatan yang mendukung smart city	% perusahaan yang taat aturan	60.000.000	APBD Kab.	DPMPTS PNaker		√	√	√	√
	Meningkatkan kualitas pember- dayaan dan pengembangan UKM agar dapat berdaya saing berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.	Program Pengembang- an UMKM	Penerapan teknologi informasi yang mendukung daya saing produk berbasis <i>web-base</i> , android dan <i>IOS</i>	% Usaha Mikro yang naik kelas	450.000.000	APBD Kab./A PBN	Dinindag kop UMKM/ DISKOMI NFO		√	√	√	√
Wajah Kota	Meningkatkan kualitas Infrastruktur & Pembuatan RTH.	Program Pengelolaan Keanekaraga- man Hayati (KEHATI)	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	% Luas RTH Baru/ Terfasilitasi	80.000.000	APBD Kab.	Dinas Lingkung an Hidup		√	√	√	√

	Menata fasilitas Bangunan dan Lingkungan (koridor, nodes dan landmark).	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penataan trotoar dan lingkungannya di jantung kota	% Jumlah Fasilitas penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan	500.000.000	APBD Kab.	DPU TARU		√	√	√	√
	Meningkatkan kualitas ketentraman dan ketertiban berbasis IT.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Cakupan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum	60.000.000	APBD Kab.	Satpol PP		√	√	√	√
	Meningkatkan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Cakupan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum	60.000.000	APBD Kab.	Satpol PP		√	√	√	√

3. Rencana Program Pembangunan Jangka Menengah *Smart Economy*

Roadmap pembangunan program jangka menengah *smart economy* diuraikan pada Tabel V.5 di bawah ini.

Tabel V.5

Rencana Program Pembangunan Jangka Menengah *Smart Economy*

Indikator <i>Smart City</i>	Sasaran <i>Smart City</i>	Program	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran (Rp.)	Sumber Pembia yaan	Pelaksana	Jangka Menengah				
								2021	2022	2023	2024	2025
SMART ECONOMY												
Ekosistem Industri	Mengembangkan industri pengolahan perikanan berbasis IPTEK	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan	Pertumbuhan produksi perikanan budidaya (Ton)	400.000.000	APBD Kab.	Dinlutkan		√	√	√	√
		Program Pengolahan & Pemasaran Hasil Perikanan	Penyediaan & Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan	Pertumbuhan Produksi Hasil Olahan Perikanan	400.000.000	APBD Kab.	Dinlutkan		√	√	√	√
	Mengembangkan ekonomi kreatif & usaha koperasi berbasis IPTEK	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif (Ekraf) Bidang Pariwisata	200.000.000	APBD Kab.	Dinbudpar		√	√	√	√
	Meningkatkan pemberdayaan koperasi.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Pertumbuhan volume usaha koperasi	200.000.000	APBD Kab.	Dinindagkop UMKM		√	√	√	√
	Membangun dan mengembangkan	Program Pengembangan	Fasilitas Usaha mikro Menjadi	Persentase Usaha Mikro	200.000.000	APBD Kab.	Dinindagkop UMKM		√	√	√	√

usaha industri untuk meningkatkan standar mutu dan daya saing produk.	UMKM	Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi, Pengolahan, Pemasaran, SDM, Desain dan Teknologi	yang naik kelas									
Meningkatkan koordinasi perangkat daerah untuk mempercepat proses perijinan berbasis teknologi informasi.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Koordinasi Perangkat Daerah	% laporan pelayanan perijinan dan non perijinan yang dikelola dengan baik	40.000.000	APBD Kab.	DPMPPTSP NAKER		√	√	√	√	
Menyusun kebijakan kemudahan investasi.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif & Kemudahan Penanaman Modal	Pertumbuhan investasi	40.000.000	APBD Kab.	DPMPPTSP NAKER		√	√	√	√	
Meningkatkan koordinasi Perangkat Daerah untuk mengembangkan sektor ekonomi.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Pengembangan sektor ekonomi	Persentase tingkat harmonisasi Perencanaan rumpun Perekonomian dan SDA	40.000.000	APBD Kab.	Bappeda		√	√	√	√	
Menyediakan dan mengembangkan prasarana dan sarana pertanian.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	% sarana pertanian dalam kondisi baik	400.000.000	APBD Kab.	DINTAN PAN		√	√	√	√	

	Meningkatkan kualitas pengelolaan perikanan tangkap dengan mengembangkan sistem informasi pelelangan.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Pertumbuhan produksi perikanan tangkap (Ton)	400.000.000	APBD Kab.	DINLUTKAN		√	√	√	√
	Mengembangkan sistem pemasaran hasil pengolahan ikan UMKM berbasis <i>online</i> .	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berbasis <i>web-base</i> , <i>android</i> & <i>IOS</i>	Pertumbuhan Produksi Hasil Olahan Perikanan	450.000.000	APBD Kab/ APBN	DINLUTKAN /DINKOMINFO		√	√	√	√
Kesejahteraan rakyat	Meningkatkan ketersediaan kebutuhan bahan pokok.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan & Kemandirian Pangan	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan	% Ketercukupan kebutuhan beras sesuai angka kecukupan gizi	400.000.000	APBD Kab.	DINTANPAN		√	√	√	√
	Membangun dan mengembangkan sektor industri.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	Pertumbuhan usaha industri	60.000.000	APBD Kab.	DININDAG KOP UMKM		√	√	√	√
	Menberdayakan dan mengembangkan usaha mikro.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Pertumbuhan Tenaga Kerja Usaha Mikro	80.000.000	APBD Kab.	DININDAG KOP UMKM		√	√	√	√

	Mengembangkan industri perempuan.	Program Pengarusutamaan Gender dan pemberdayaan Perempuan	Pendampingan industry perempuan menjadi pelaku usaha	% industri perempuan (IR) yang mendapatkan pendampingan menjadi pelaku usaha	60.000.000	APBD Kab.	DINSOS PPKB		√	√	√	√
	Mengembangkan sistem Informasi data potensi sumber kesejahteraan sosial daerah di Kabupaten.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	% Rumusan Bahan kebijakan yang menjadi kebijakan bidang Kesejahteraan Rakyat	60.000.000	APBD Kab.	SETDA		√	√	√	√
	Meningkatkan kualitas pelatihan kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Pertumbuhan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	80.000.000	APBD Kab.	DPMPTSP NAKER		√	√	√	√
Meningkatkan kapasitas usaha koperasi melalui pemberdayaan dan perlindungan.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan	Persentase Koperasi yang Patuh Pada Ketentuan Peraturan	Pertumbuhan volume usaha koperasi	40.000.000	APBD Kab.	DININDAG KOP UMKM		√	√	√	√
	Mengembangkan UMKM dengan memanfaatkan teknologi informasi.	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	% Usaha Mikro yang naik kelas	60.000.000	APBD Kab.	DININDAG KOP UMKM		√	√	√	√

4. Rencana Program Pembangunan Jangka Menengah *Smart Living*

Roadmap pembangunan program jangka menengah *smart living* diuraikan pada Tabel V.6 di bawah ini.

Tabel V.6
Rencana Program Pembangunan Jangka Menengah *Smart Living*

Indikator <i>Smart City</i>	Sasaran <i>Smart City</i>	Program	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran (Rp.)	Sumber Pembia- yaan	Pelaksana	Jangka Menengah				
								2021	2022	2023	2024	2025
SMART LIVING												
Harmoni- sasi Tata Ruang Wilayah	Menata bangunan dan lingkungan sesuai dengan pemanfaatannya	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penataan bangunan dan lingkungan	% jumlah fasili- tasi penyelengga- raan penataan bangunan & lingkungan	600.000.000	APBD Kab	DPUTARU		√	√	√	√
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Pemeliharaan bangunan dan lingkungan	% jumlah fasili- tasi penyelengga- raan penataan bangunan & lingkungan	150.000.000	APBD Kab	DPUTARU			√	√	√
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR	Pertumbuhan kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTR	40.000.000	APBD Kab	DPUTARU			√	√	√
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Peningkatan peran masyarakat dalam penataan ruang	Pertumbuhan kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTR	40.000.000	APBD Kab	DPUTARU		√	√	√	√
		Program Penyelenggaraan	Koordinasi dan Sinkronisasi	Pertumbuhan Kesesuaian	40.000.000	APBD Kab	DPUTARU		√	√	√	√

		Penataan Ruang	Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Pemanfaatan Ruang terhadap RTR								
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Sistem Informasi Penataan Ruang berbasis <i>web-base</i> , android dan <i>IOS</i>	Pertumbuhan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap RTR	450.000.000	APBD Kab/APBN	DPUTARU/DINKOMINFO		√	√	√	√
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum bidang Penataan Ruang	Pertumbuhan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap RTR	40.000.000	APBD Kab	DPUTARU		√	√	√	√
Meningkatkan kualitas penanganan kawasan permukiman kumuh		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	% Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak di Luar Kawasan Kumuh	1,000,000,000	APBD Kab	DPKP		√	√	√	√
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Pere-majaan Permukiman kumuh	% Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak di Luar Kawasan Kumuh	40.000.000	APBD Kab	DPKP		√	√	√	√
		Program Perumahan & Kawasan Permukiman Kumuh	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara Bagi	% Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang	400.000.000	APBD Kab	DPKP		√	√	√	√

			Masyarakat yang Terkena Program Perumahan Kumuh	layak di Luar Kawasan Kumuh								
Merehabilitasi rumah korban bencana/ merelokasi	Program Pengembangan Perumahan	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi	% Rumah terdampak bencana / relokasi	40,000,000	APBD Kab	DPKP		√	√	√	√	
	Program Pengembangan Perumahan	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi	% Rumah terdampak bencana / relokasi	40.000.000	APBD Kab	DPKP		√	√	√	√	
	Program Pengembangan Perumahan	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana	% Rumah terdampak bencana / relokasi	40.000.000	APBD Kab	DPKP		√	√	√	√	
	Program Pengembangan Perumahan	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	% Rumah terdampak bencana / relokasi	400.000.000	APBD Kab	DPKP		√	√	√	√	
	Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	% Rumah terdampak bencana / relokasi	1.000.000.000	APBD Kab	DPKP		√	√	√	√	
Meningkatkan prasarana dan sarana umum(PSU)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana & Utilitas Umum (PSU)	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	% Ketercukupan PSU di Perumahan	100.000.000	APBD Kab	DPUTARU		√	√	√	√	

		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, & Utilitas Umum Perumahan	% Ketercukupan PSU di Perumahan	40.000.000	APBD Kab	DPUTARU		√	√	√	√
	Meningkatkan & mengembangkan bangunan dan lingkungan pedestrian serta kawasan perkantoran	Program Penyelenggaraan Jalan	Rehabilitasi Jalan bagi pejalan kaki	% Pertumbuhan jalan dalam kondisi mantap	400.000.000	APBD Kab	DPUTARU		√	√	√	√
	Meningkatkan kualitas penanggulangan bencana di kawasan rawan bencana	Program Penanggulangan Bencana	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten	% penanganan kejadian bencana	200.000.000	APBD Kab	BPPBD		√	√	√	√
			Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	% desa tangguh bencana di kawasan rawan bencana	200.000.000	APBD Kab	BPPBD		√	√	√	√
Prasarana Kesehatan	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan budaya hidup sehat	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan & Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	60.000.000	APBD Kab	DINKES		√	√	√	√
			Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	40.000.000	APBD Kab	DINKES		√	√	√	√

		Pengembangan & Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM)	Cakupan desa siaga mandiri	60.000.000	APBD Kab	DINKES		√	√	√	√
Meningkatkan kualitas sarana prasarana kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	% pemenuhan sarpras layanan penunjang sesuai klasifikasi RS & sertifikasi layanan penunjang	500.000.000	APBD Kab	DINKES		√	√	√	√
		Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	% pemenuhan sarpras layanan penunjang sesuai klasifikasi RS & sertifikasi layanan penunjang	500.000.000	APBD Kab	DINKES		√	√	√	√
Menyediakan fasilitas telekonsultasi pada Puskesmas	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan berbasis telekonsultasi	Cakupan Puskesmas memiliki layanan telekonsultasi	80.000.000	APBD Kab	DINKES		√	√	√	√
Integrasi sistem informasi Kependudukan dan KB	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Penyediaan sistem informasi pendukung operasional PKB/ PLKB berbasis <i>web-base</i> , android dan <i>IOS</i>	% Penggunaan KB MKJP	450,000,000	APBD Kab/ APBN	DINSOSPPKB / DINKOMINFO		√	√	√	√
Meningkatkan kualitas	Program Pemenuhan	Pengelolaan Jaminan	Cakupan kepesertaan	40,000,000	APBD Kab	DINKES		√	√	√	√

layanan JKN.	Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan Masyarakat	JKN masyarakat									
Meningkatkan & mengembangk-kan kualitas Sarana dan Prasarana teknologi informasi Rumah Sakit	Program Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Penyediaan Sistem Informasi data PMKS berbasis <i>web-base</i> , android dan <i>IOS</i>	% Ketersediaan sarpras teknologi informasi RS	450,000,000	APBD Kab/ APBN	RSUD/ DINKOMINFO		√	√	√	√	
	Program Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Mengembnagkan aplikasi Penangan-uran Kegawatda-ruratan Maternal berbasis ARJUNO	% Ketersediaan sarpras teknologi informasi RS	60,000,000	APBD Kab	RSUD		√	√	√	√	
	Program Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Sistem Deteksi Dini Gejala Serangan Stroke berikut penanganannya di RS	% Ketersediaan sarpras teknologi informasi RS	60,000,000	APBD Kab	RSUD		√	√	√	√	
	Program Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Aplikasi e-Office bagi jajaran struktural RS di SIMRS	% Ketersediaan sarpras teknologi informasi RS	60,000,000	APBD Kab	RSUD		√	√	√	√	
	Program Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Aplikasi rekam medis elektronik (RME) pada laya-nan rawat inap di RS di SIMRS	% Ketersediaan sarpras teknologi informasi RS	60,000,000	APBD Kab	RSUD		√	√	√	√	
	Meningkatkan ketersediaan obat, alat kese-	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan,	Pengendalian dan Pengawasan	% Ketersediaan obat esensial di Puskesmas	60,000,000	APBD Kab	DINKES		√	√	√	√

	hatan, makanan dan minuman	Makanan & Minuman	sediaan obat di Puskesmas										
Sarana Transportasi	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten	% ketersediaan Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten	200.000.000	APBD Kab	DISHUB		√	√	√	√	
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Sarana & Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	% kendaraan laik jalan	400.000.000	APBD Kab	DISHUB		√	√	√	√	
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas & Angkutan Jalan (LLAJ)	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	% manajemen rekayasa lalu lintas yang terlaksana	200.000.000	APBD Kab	DISHUB		√	√	√	√	
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten	% angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan	3.000.000.000	APBD Kab	DISHUB		√	√	√	√	
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen & Rekayasa Lalu Lintas	% Lalu lintas berkeselamatan	400.000.000	APBD Kab	DISHUB		√	√	√	√	

		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Fasilitasi pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan & Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik berbasis <i>web-base</i> , android & <i>IOS</i>	% terminal dan perparkiran yang terkelola	450,000,000	APBD Kab/ APBN	DISHUB/ DINKOMINFO		√	√	√	√
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas & Angkutan Jalan (LLAJ)	Audit & Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	% Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ	40.000.000	APBD Kab	DISHUB		√	√	√	√

5. Rencana Program Pembangunan Jangka Menengah *Smart Society*

Roadmap pembangunan program jangka menengah *smart society* diuraikan pada Tabel V.7 di bawah ini.

Tabel V.7

Rencana Program Pembangunan Jangka Menengah *Smart Society*

Indikator <i>Smart City</i>	Sasaran <i>Smart City</i>	Program	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran (Rp.)	Sumber Pembia- yaan	Pelaksana	Jangka Menengah				
								2021	2022	2023	2024	2025
SMART SOCIETY												
Interaksi Masyara- kat yang Efisien (Komuni- tas)	Meningkatkan kualitas pembinaan kegiatan kepemudaan dan kepramukaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan	% Perolehan medali olahraga	400.000.000	APBD Kab	DINDIKPORA		√	√	√	√
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda & Kepemu- daan Terhadap Pemuda Pelopor, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader	% prestasi kepemudaan	400,000,000	APBD Kab	DINDIKPORA		√	√	√	√
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	% aktivitas kepramukaan dalam kemasyarakatan	250,000,000	APBD Kab	DINDIKPORA		√	√	√	√
	Meningkatkan peran masya- rakat dalam ketahanan ekonomi,	Program Pembina- an & Pengem- bangan Ketaha- nan Ekonomi Sosial & Budaya	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya	% masyarakat yang paham terhadap ketaha- nan, ekonomi, sosial dan budaya	40.000.000	APBD Kab	DINBUDPAR		√	√	√	√

	sosial dan budaya termasuk dalam pembangunan smart city	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya	% masyarakat yang paham terhadap ketahanan, ekonomi, sosial & budaya	40.000.000	APBD Kab	DINBUDPAR		√	√	√	√
	Meningkatkan event-event/ aktivitas seni dan budaya	Program Pengembangan Kebudayaan	Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten	% seni tradisi yang dikembangkan menjadi daya tarik wisata	300.000.000	APBD Kab	DINBUDPAR		√	√	√	√
		Program Pengembangan Kebudayaan	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	% seni tradisi yang dikembangkan menjadi daya tarik wisata	300.000.000	APBD Kab	DINBUDPAR		√	√	√	√
		Program Pengembangan Kebudayaan	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	% seni tradisi yang dikembangkan menjadi daya tarik wisata	200.000.000	APBD Kab	DINBUDPAR		√	√	√	√
		Program Pengembangan Kebudayaan	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	% seni tradisi yang dikembangkan menjadi daya tarik wisata	100.000.000	APBD Kab	DINBUDPAR		√	√	√	√
		Program Pengembangan Kebudayaan	Penyediaan fasilitas untuk pengembangan komunitas kesenian dan kebudayaan	% seni tradisi yang dikembangkan menjadi daya tarik wisata	500.000.000	APBD Kab	DINBUDPAR		√	√	√	√
		Meningkatkan pembinaan terhadap	Program Penguatan Ideologi	Pelaksanaan Koordinasi & pembinaan masyarakat	% masyarakat yang paham terhadap ideologi	40.000.000	APBD Kab	KESBANGPOL		√	√	√

	komunitas yang berseberangan dengan ideologi dan nilai-nilai Pancasila	Pancasila dan Karakter Kebangsaan	di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pancasila dan wasbang								
Ekosistem Belajar yang Efisien	Meningkatkan pelayanan umum perpustakaan berbasis teknologi informasi	Program Pembinaan Perpustakaan	Pengembangan & Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik berbasis <i>web-base</i> , android dan <i>IOS</i>	% Peningkatan Perpustakaan Yang Aktif (Cakupan pelayanan umum perpustakaan)	450.000.000	APBD Kab/ APBN	Dinas Kearsipan & Perpustakaan/ DINKOMINFO		√	√	√	√
		Program Pembinaan Perpustakaan	Pengembangan Bahan Pustaka	% Peningkatan Perpustakaan yang Aktif (Cakupan pelayanan umum perpustakaan)	200,000,000	APBD Kab	Dinas Kearsipan & Perpustakaan		√	√	√	√
		Program Pembinaan Perpustakaan	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar & Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	% Peningkatan Perpustakaan yang Aktif (Cakupan pelayanan umum perpustakaan)	40,000,000	APBD Kab	Dinas Kearsipan & Perpustakaan		√	√	√	√
		Program Pembinaan Perpustakaan	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	% Peningkatan Perpustakaan yang Aktif (Cakupan pelayanan umum perpustakaan)	40,000,000	APBD Kab	Dinas Kearsipan & Perpustakaan		√	√	√	√
	Meningkatkan kualitas pengelolaan	Program Pendidik dan Tenaga	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik & Tenaga Kependi-	% Satuan Pendidikan yang memiliki GTK	100.000.000	APBD Kab	DINDIKPORA		√	√	√	√

	pendidikan	Kependidikan	dikan Satuan Pendi- dikan Dasar, PAUD, & Pendidikan Non formal/Kesetaraan	bersertifikat pendidik								
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Penataan Pendistri- busian Pendidik & Tenaga Kependidi- kan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, & Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	% Satuan Pendidikan yang memiliki GTK bersertifikat pendidik	100.000.000	APBD Kab	DINDIKPORA		√	√	√	√
		Program Pengelolaan Pendidikan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ % Lembaga PAUD yang terakreditasi A ▪ Persentase lembaga DIKMAS yang terakreditasi A ▪ % Lembaga SD yang terakreditasi A ▪ % Lembaga SMP yang terakreditasi A 	400.000.000	APBD Kab	DINDIKPORA		√	√	√	√
		Program Pengelolaan Pendidikan	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidi- kan pada Satuan Pendidikan Non formal/Kesetaraan, Sekolah Dasar dan Menengah Pertama	% Guru yang memenuhi kualifikasi dan berkompetensi	400.000.000	APBD Kab	DINDIKPORA		√	√	√	√
	Meningkatkan kualitas pengelolaan arsip dengan mengembang-	Program Pengelolaan Arsip	Penyediaan Infor- masi akses dan layanan kearsipan tingkat daerah melalui JIKN	% OPD Yang Tertib Administrasi Kearsipan	450,000,000	APBD Kab/ APBN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan/ DINKOMINFO		√	√	√	√

	kan SIKD		berbasis <i>web-base</i> , android dan <i>IOS</i>									
		Program Pengelolaan Arsip	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah	% OPD Yang Tertib Administrasi Kearsipan	60,000,000	APBD Kab	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		√	√	√	√
	Mengembang- kan kurikulum bermuatan local	Program Pengembangan Kurikulum	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	% Lembaga SMP yang menerapkan kurikulum muatan lokal	80.000.000	APBD Kab	DINDIKPORA		√	√	√	√
		Program Pengembangan Kurikulum	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	% Lembaga PAUD, DIKMAS, SD dan yang menerapkan kurikulum muatan lokal	80.000.000	APBD Kab	DINDIKPORA		√	√	√	√
	Mengembang- kan pengelo- laan sistem data gender dan anak	Program Pengelolaan Sistem Data Gender	Penyediaan Data Gender dan Anak berbasis <i>web-base</i> , android dan <i>IOS</i>	Persentase Ketersediaan Data Gender dan Anak	450,000,000	APBD Kab/ APBN	DINSOSPPKB/ DINKOMINFO		√	√	√	√
	ngkatkan layanan data KPAD & FAD untuk Pemenuhan Hak Anak.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Persentase Kelp. Perlindungan Anak Desa/ Kelurahan	100,000,000	APBD Kab	DINSOSPPKB		√	√	√	√
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Persentase Kelp. Perlindungan Anak Desa/ Kelurahan	100,000,000	APBD Kab	DINSOSPPKB		√	√	√	√

		Program Pemenuhan Hak Anak	Pengembangan Komunikasi, Informasi & Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Persentase Kelp. Perlindungan Anak Desa/ Kelurahan	60.000.000	APBD Kab	DINSOSPPKB	√	√	√	√
	Mengembangkan SIMP TK untuk meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan berbasis SIMP TK	% Satuan Pendidikan yang memiliki GTK bersertifikat pendidik	100.000.000	APBD Kab	DINDIKPORA	√	√	√	√
Sistem Keamanan Masyarakat	Meningkatkan kualitas & kuantitas bantuan sosial	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial	400.000.000	APBD Kab	BPPD	√	√	√	√
	Meningkatkan pelayanan penanganan kejadian bencana	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Berbasis teknologi informasi berbasis <i>web-base</i> , android dan IOS	% penanganan kejadian bencana	450.000.000	APBD Kab/ APBN	BPPD/DINK OMINFO	√	√	√	√
		Program Penanggulangan Bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	% desa tangguh bencana di kawasan rawan bencana	200.000.000	APBD Kab	BPPD	√	√	√	√
		Program Penanggulangan Bencana	Respon Cepat Darurat Bencana	% penanganan kejadian bencana	400.000.000	APBD Kab	BPPD	√	√	√	√
		Program Penanggulangan Bencana	Penguatan Kelembagaan Bencana	% penanganan kejadian bencana	200.000.000	APBD Kab	BPPD	√	√	√	√

Buku 2: Masterplan Rembang Smart City

		Program Penanggulangan Bencana	Pelatihan Pencegahan & Mitigasi Bencana	% penanganan kejadian bencana	200.000.000	APBD Kab	BPBD		√	√	√	√
Meningkatkan kualitas pelayanan bencana kebakaran		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pencegahan Kebakaran	cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Rembang	200.000.000	APBD Kab	SATPOL PP		√	√	√	√
			Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran	cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Rembang	400.000.000	APBD Kab	SATPOL PP		√	√	√	√
			Pendataan, penilaian dan penyediaan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	% sarana prasarana pemadam kebakaran yang representative	40.000.000	APBD Kab	SATPOL PP		√	√	√	√
			Pelayanan Informasi Rawan Bencana berbasis <i>web-base</i> , android dan <i>IOS</i>	% penanganan kejadian bencana	450.000.000,	APBD Kab/ APBN	BPBD/ DINKOMINFO		√	√	√	√
Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dengan memanfaatkan aplikasi secara online		Program Peningkatan Ketenteraman & Ketertiban Umum	Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	100.000.000	APBD Kab	SATPOL PP		√	√	√	√
		Program Peningkatan Ketenteraman & Ketertiban Umum	Perda Kabupaten dan Peraturan Bupati	% Penegakan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	100.000.000	APBD Kab	SATPOL PP		√	√	√	√

	Meningkatkan kesadaran & peran masyarakat tentang pencemaran & /atau kerusakan lingkungan hidup	Program Peningkatan Pendidikan & Pelatihan & Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	% peserta yang memperoleh pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH	100.000.000	APBD Kab	Kantor lingkungan hidup		√	√	√	√
--	---	---	---	---	-------------	----------	-------------------------	--	---	---	---	---

6. Rencana Program Pembangunan Jangka Menengah *Smart Environment*

Roadmap pembangunan program jangka menengah *smart environment* diuraikan pada Tabel V.8 di bawah ini.

Tabel V.8

Rencana Program Pembangunan Jangka Menengah *Smart Environment*

Indikator <i>Smart City</i>	Sasaran <i>Smart City</i>	Program	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran (Rp.)	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Jangka Menengah				
								2021	2022	2023	2024	2025
SMART ENVIRONMENT												
Proteksi Lingkungan	Meningkatkan jumlah RTH	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	% Luas RTH Baru / Terfasilitasi	200.000.000	APBD Kab	Dinas Lingkungan hidup		√	√	√	√
	Meningkatkan kualitas layanan ijin lingkungan berbasis TI	Program Pembinaan & Pengawasan terhadap Ijin Lingkungan dan Ijin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Ijin Lingkungan dan Ijin PPLH diterbitkan	% ijin lingkungan yg terfasilitasi	60.000.000	APBD Kab	Dinas Lingkungan hidup		√	√	√	√

	Meningkatkan peran masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	% Penghargaan LH utk sekolah % Penghargaan LH utk kelurahan	200.000.000	APBD Kab	Dinas Lingkungan hidup		√	√	√	√
	Meningkatkan kualitas bangunan air/irigasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder	% bangunan air/Irigasi kewenangan Kabupaten dalam kondisi baik	400.000.000	APBD Kab	Dinas Lingkungan hidup		√	√	√	√
	Meningkatkan pengendalian pencemaran & /atau kerusakan lingkungan hidup	Program Pengendalian Pencemaran & /atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	% Hasil Pemantauan Lingkungan Tidak Melebihi Cemar Ringan	200.000.000	APBD Kab	Dinas Lingkungan hidup		√	√	√	√
Tata Kelola Sampah dan Limbah	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi izin TPS dan limbah B3.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya & Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya & Beracun (Limbah B3)	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	% perusahaan yang memiliki TPS limbah B3	200.000.000	APBD Kab	Dinas Lingkungan hidup		√	√	√	√
	Meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah	Program Pengelolaan Persampahan	pengelolaan Sampah	Persentase pengelolaan sampah	200.000.000	APBD Kab	Dinas Lingkungan hidup		√	√	√	√

	Mengembangkan sistem pengelolaan persampahan	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan	Persentase Rumah Tangga Yang Mengakses Sistem Jaringan Persampahan	200.000.000	APBD Kab	Dinas Lingkungan hidup		√	√	√	√
--	--	--	---	--	-------------	----------	------------------------	--	---	---	---	---

5.3. Rencana Program Pembangunan Jangka Panjang

Roadmap atau peta jalan pembangunan *Smart City* Kabupaten Rembang jangka panjang diuraikan berdasarkan 6 (enam) dimensi *Smart City*.

1. Rencana Program Pembangunan Jangka Panjang *Smart Governance*

Roadmap pembangunan program jangka panjang *Smart Governance* diuraikan pada Tabel V.9 di bawah ini.

Tabel V.9

Rencana Program Pembangunan Jangka Panjang *Smart Governance*

Indikator <i>Smart City</i>	Sasaran <i>Smart City</i>	Program	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran (Rp.)	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Jangka Panjang														
								2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
SMART GOVERNANCE																						
Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung	Persentase profil data kependudukan	2.500.000.000	APBD Kab	DISDUK CAPIL						√	√	√	√	√	√				

	Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	% ASN yang mengikuti diklat sesuai kebutuhan	1.300.000.000	APBD Kab	BKD						√	√	√	√	√	√
--	--	--	---	--	---------------	----------	-----	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

2. Rencana Program Pembangunan Jangka Panjang *Smart Branding*

Roadmap pembangunan program jangka panjang *smart branding* diuraikan pada Tabel V.10 di bawah ini.

Tabel V.10

Rencana Program Pembangunan Jangka Panjang *Smart Branding*

Indikator <i>Smart City</i>	Sasaran <i>Smart City</i>	Program	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran (Rp.)	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Jangka Panjang													
								2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
SMART BRANDING																					
Ekosistem Pariwisata	Mengembangkan keunikan dan kekhasan potensi pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Pertumbuhan daya tarik Destinasi Pariwisata yang dikembangkan	500.000.000	APBD Kab	DINBUD PAR						√	√	√	√	√	√			

3. Rencana Program Pembangunan Jangka Panjang *Smart Economy*

Roadmap pembangunan program jangka panjang *smart economy* diuraikan pada Tabel V.11 di bawah ini.

Tabel V.11

Rencana Program Pembangunan Jangka Panjang Smart Economy

Indikator Smart City	Sasaran Smart City	Program	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran (Rp.)	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Jangka Panjang													
								2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
SMART ECONOMY																					
Ekosistem Industri	Menyediakan dan mengembangkan prasarana dan sarana pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	% sarana pertanian dalam kondisi baik	300.000.000	APBD Kab	DINTAN PAN						√	√	√	√	√	√	√	√	
			Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	% sarana pertanian dalam kondisi baik	75.000.000	APBD Kab	DINTAN PAN							√	√	√	√	√	√	√	√
		Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pertumbuhan kelas kelompok tani	75.000.000	APBD Kab	DINTAN PAN							√	√	√	√	√	√	√	√
	Mengembangkan sistem pemasaran hasil pengolahan ikan UMKM berbasis online	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penyediaan Data & Informasi Usaha Pemasaran & Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten berbasis <i>web-base</i> , android & IOS	Pertumbuhan Produksi Hasil Olahan Perikanan	450.000.000	APBD Kab/ APBN	DINLUTKAN / DINKOMINFO								√	√	√	√	√	√	√

4. Rencana Program Pembangunan Jangka Panjang *Smart Living*

Roadmap pembangunan program jangka panjang *smart living* diuraikan pada Tabel V.12 di bawah ini.

Tabel V.12

Rencana Program Pembangunan Jangka Panjang *Smart Living*

Indikator <i>Smart City</i>	Sasaran <i>Smart City</i>	Program	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran (Rp.)	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Jangka Panjang														
								2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
SMART LIVING																						
Harmoni sasi Tata Ruang Wilayah	Meningkatkan kualitas penangan kawasan permukiman kumuh	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	% Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak di Luar Kawasan Kumuh	100.000.000	APBD Kab	DPKP						√	√	√	√	√	√	√			
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh & Berkembangnya Permukiman Kumuh	% Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak di Luar Kawasan Kumuh	5.000.000.000	APBD Kab	DPKP							√	√	√	√	√	√	√		
	tingkatkan prasarana dan sarana umum (PSU)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana & Utilitas Umum (PSU)	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Prasarana & Sarana Umum (PSU) perumahan dan Kawasan Permukiman yang dicukupi	1.500.000.000	APBD Kab	DPKP							√	√	√	√	√	√	√		

Prasarana Kesehatan	Meningkatkan kualitas sarana prasarana kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	% pemenuhan sarpras layanan penunjang sesuai klasifikasi RS & sertifikasi layanan penunjang	500.000.000	APBD Kab	RSUD						√	√	√	√	√	√		
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	% pemenuhan sarpras layanan penunjang sesuai klasifikasi RS & sertifikasi layanan penunjang	1.000.000.000	APBD Kab	RSUD								√	√	√	√	√	√
	Meningkatkan dan mengembangkan kualitas Sarana dan Prasarana teknologi informasi Rumah Sakit	Program Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan yang dikelola dokter berbasis <i>web-base</i> , android dan <i>IOS</i>	% Ketersediaan sarpras teknologi informasi RS	450.000.000	APBD Kab/APBN	RSUD/DINKOMINFO							√	√	√	√	√	√	
			Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi e-aset berbasis <i>web-base</i> , android dan <i>IOS</i>	% Ketersediaan sarpras teknologi informasi RS	450.000.000	APBD Kab/APBN	RSUD/DINKOMINFO								√	√	√	√	√	√
			Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan online	% Ketersediaan sarpras teknologi informasi RS	50.000.000	APBD Kab	RSUD								√	√	√	√	√	√
			Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan & Jaringan Internet	% Ketersediaan sarpras teknologi informasi RS	50.000.000	APBD Kab	RSUD								√	√	√	√	√	√

Sarana Transportasi	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	% Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ	300,000,000	APBD Kab	Dinas Perhubungan					√	√	√	√	√	√
			Pelaksanaan Inspeksi, Audit & Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	% Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ	300,000,000	APBD Kab	Dinas Perhubungan					√	√	√	√	√	√
	Meningkatkan kegiatan pelaksanaan Manajemen & Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penataan Manajemen & Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	% manajemen rekayasa lalu lintas yang terlaksana	2,000,000,000	APBD Kab	Dinas Perhubungan					√	√	√	√	√	√
			Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	% manajemen rekayasa lalu lintas yang terlaksana	2,000,000,000	APBD Kab	Dinas Perhubungan					√	√	√	√	√	√
	Memenuhi kebutuhan perlengkapan jalan & penyediaan angkutan umum	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten (termasuk pengadaan CCTV diruas jalan strategi)	Persentase ketersediaan Perengkapan Jalan di jalan Kabupaten	3,000,000,000	APBD Kab	Dinas Perhubungan					√	√	√	√	√	√
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten	Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan	3,000,000,000	APBD Kab	Dinas Perhubungan					√	√	√	√	√	√

		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan umum dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (SIM) berbasis <i>web-base</i> , android dan IOS	Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan	450.000.000	APBD Kab/APBN	Dinas Perhubungan/DINKO MINFO							√	√	√	√	√	√
--	--	---	---	---	-------------	---------------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

5. Rencana Program Pembangunan Jangka Panjang *Smart Society*

Roadmap pembangunan program jangka panjang *smart society* diuraikan pada Tabel V.13 di bawah ini.

Tabel V.13

Rencana Program Pembangunan Jangka Panjang *Smart Society*

Indikator <i>Smart City</i>	Sasaran <i>Smart City</i>	Program	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran (Rp.)	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Jangka Panjang															
								2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030						
SMART SOCIETY																							
Ekosistem Belajar yang Efisien	tingkatkan kualitas pengelolaan pendidikan	Manajemen Pendidikan	Pembinaan Kelembagaan & Manajemen Sekolah Non formal/ Kesetaraan	Peringkat nasional usia 7-18 tahun dalam pendidikan kesetaraan	300.000.000	APBD Kab	DINDIKPO RA							√	√	√	√	√	√				

		Program Pengelolaan Pendidikan	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APK PAUD 3-6 Tahun 	300.000.000	APBD Kab	DINDIKP ORA					√	√	√	√	√	√
		Program Pengelolaan Pendidikan	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APK PAUD 3-6 Tahun ▪ APM SD/MI/ sederajat ▪ APM SMP/MTs/ sederajat 	300.000.000	APBD Kab	DINDIKP ORA					√	√	√	√	√	√

6. Rencana Program Pembangunan Jangka Panjang *Smart Environment*

Adapun untuk *smart environment* tidak terdapat program jangka panjang. Semua program *smart environment* sudah masuk dalam *roadmap* pembangunan program jangka menengah.

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ